

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat

Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 -2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini merupakan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara produktif, efektif dan efisien sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Padang, Januari 2022  
Kepala Dinas  
**Dr.Ir.DESNIARTI,MM**  
Pembina TK.I Nip. 19650824 199003 2 001

## *IKHTISAR EKSEKUTIF*

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RI No. 53 Tahun 2014, dan Pergub 71 Tahun 2020 bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur.

Laporan Kinerja ini bertujuan Untuk melihat tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi LAKIP / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun sebelumnya dan kemudian menjadi Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Setelah dilakukan analisis sebagaimana yang dijelaskan secara rinci pada Bab III Laporan Kinerja ini, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dengan 4 Sasaran dan 6 Indikator Kinerja yang diukur mendapat nilai bobot kategori **Memuaskan dan Sangat Baik**, ke 6 indikator kinerja dengan rata-rata diatas 100% yaitu 111,00% dengan kategori **Memuaskan**, Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1” Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan indikator kinerja yaitu ; Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th) dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th)
  - Target capaian kinerja yaitu jumlah pendapatan nelayan tahun 2021 sebesar Rp.38.400.000/org/th terealisasi sebesar Rp.40.452.555/org/th dengan capaian 105,35% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (memuaskan), kegiatan ini di dukung dari jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 219.570,3 ton.
  - Adapun target capaian kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan tahun 2021 dengan target sebesar Rp.49.800.000/org/th terealisasi sebesar Rp.49.922.320/org/th dengan capaian 100,25% dengan kategori memuaskan. Data ini didukung oleh jumlah produksi budidaya sebesar 261.573,39 ton pada tahun 2021, jumlah pembudidaya ikan 89.828 orang.

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan adalah:

- Masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB dan CPIB serta teknologi dalam budidaya.
- Terbatasnya modal usaha, sehingga sarana prasarana menjadi terbatas.
- Pemasaran yang sifatnya masih lokal dan regional membuat pembudidaya kurang berkembang.

2. Capaian sasaran strategis 2” Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

- Target capaian kinerja Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 84,34% dengan capaian 105,43% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (memuaskan).

Hambatan yang ditemui dalam upaya pencapaian persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu:

- Aplikasi dalam pembuatan surat izin usaha perikanan masih baru, jadi belum semua pelaku usaha perikanan mengetahuinya atau memahaminya
- Sarana pengawasan di laut kurang memadai.

3. Capaian sasaran strategis 3” Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dan Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)

- Target capaian kinerja yaitu Nilai ekspor hasil perikanan (milyar) tahun 2020 sebesar 153,76 (milyar) terealisasi sebesar 230,62 (milyar) dengan capaian 149,99% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (memuaskan).
- Sedangkan target indikator kinerja tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) tahun 2021 sebesar 39 kg/kapita/th dan teralisasi sebesar 40,40 kg/kapita/th dengan capaian 103,59% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (memuaskan).

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan yaitu:

1. Belum terpenuhinya kuota dan kualitas produk yang akan diekspor.
2. Belum seluruhnya masyarakat mengkonsumsi ikan sesuai dengan standar yang seharusnya.

4. Capaian sasaran strategis 4” Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja A (80,10)
- Target capaian kinerja yaitu Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja A (80,10) dengan realisasi 81,21 (A) dengan capaian 101,39% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (memuaskan).

Selama Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mampu meraih beberapa keberhasilan dan prestasi yang cukup membanggakan sebagai bentuk dari kerja keras dan upaya yang dilakukan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, diantaranya:

1. Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diberikan kepada CV. Samara Food Payakumbuh Sumatera Barat Juara 3 Penilaian Unit Pengolahan Ikan Terbaik Tahun 2021 Kategori Skala Mikro Kecil
2. Penghargaan dari menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat Atas Partisipasi Mendukung Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat di Daerahnya

Untuk masa yang akan datang hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif .....	2
Daftar Isi .....	6
Daftar Tabel .....	
Daftar Grafik .....	
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3. Gambaran Umum.....	8
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.5. Struktur Organisasi.....	20
1.6. Sumber Daya Manusia (SDM).....	21
1.7. Apek Strategis Organisasi.....	22
1.8. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	26
<b>II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>29</b>
2.1. Rencana Strategis.....	29
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	37
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	37
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>40</b>
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	40
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	41
C. Capaian Kinerja Organisasi .....	42
D. Realisasi Anggaran .....	91
1. Realisasi Anggaran APBD .....	91
2. Realisasi Anggaran APBN .....	99
3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	101
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	
2. Lain-lain yang dirasa perlu	

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan bagian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance And Clean Government) di Indonesia.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk sarana penyampaian informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.



Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja terkait dengan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan di periode mendatang.

### 1.3. GAMBARAN UMUM

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah : UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 3 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Kepala Dinas**

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

- pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
  - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
  - d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana Kelautan dan Perikanan;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
  - g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;
  - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1.4.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan dinas
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Program.
- d. Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### 1.4.3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
  - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

#### **1.4.4. Bidang Perikanan Tangkap**

- (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
  - a. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  - c. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

#### **1.4.5. Bidang Perikanan Budidaya**

- (1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbenihan dan Pakan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

#### 1.4.6. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (3) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:
  - a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

- b. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan.

#### **1.4.7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III;
- e. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **(1). UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :**

- 1. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
- 4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan;
- b. pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan;
- c. pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan;
- e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan;
- g. pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan ,kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **(2). UPTD PELABUHAN PERIKANAN**

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan,

- pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
  - e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada UPTD; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
- d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**(3). UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:**

- a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Konservasi;
- d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan



- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan Umum Danau Singkarak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **(4). UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)**

Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri

atas: a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Mutu;
- d. Seksi Penerapan Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu hasil perikanan.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

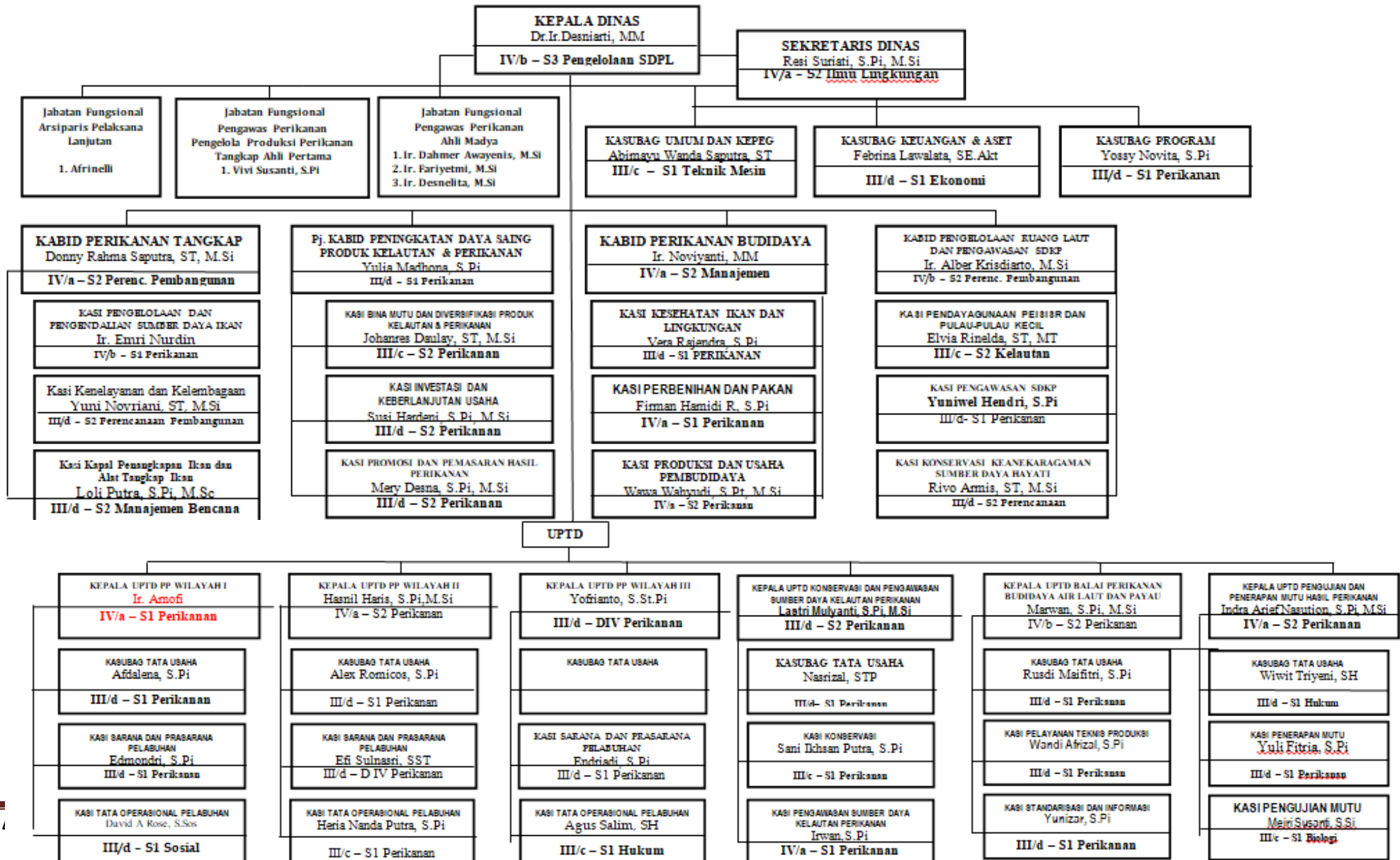
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan;
- b. pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- d. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium mutu hasil perikanan;
- f. penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD;
- g. pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN DESEMBER TAHUN 2021



### 1.6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan jumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut:

#### 1.6.1. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah 260 orang yang terdiri :

1. PNS : 139 orang
2. PTT : -
3. Non PNS/Outsourcing : 121 orang

#### 1.6.2. Komposisi Kepegawaian

Komposisi kepangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Golongan IV : 15 orang
1. Golongan III : 97 orang
2. Golongan II : 24 orang
3. Golongan I : 3 orang
4. Non PNS/Outsourcing : 121 orang
5. PTT : -

#### 1.6.3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. S3 : 1 orang
2. Pasca Sarjana (S2) : 20 orang
3. Sarjana (S1) : 76 orang
4. Diploma III : 5 orang
5. D IV : 4 orang
6. SLTA : 30 orang
7. SLTP : 2 orang
8. SD : 1 orang

#### 1.6.4. Aset / Modal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset / modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga memiliki kendaraan Dinas diatas air seperti kapal pengawasan dan speed boat yang digunakan untuk melakukan operasional pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kelautan dan Perikanan baik di Provinsi maupun di UPTD memiliki sarana elektronik berupa komputer, laptop dan printer, sarana komunikasi seperti Telephone dan Faximile dan Mobiler dan peralatan kantor lainnya seperti meja dan kursi kantor, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya.

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya:1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2). UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, 4).UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, 5). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan 6). Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau yang hingga saat ini masih operasional.

#### 1.7. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, mengisi pembangunan



Kelautan dan Perikanan dengan menelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 – 2021 Provinsi Sumatera Barat.

Visi Kepala Daerah adalah:” **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**. Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dalam 1 misi yaitu :

**Misi 4:** Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

Sumatera Barat, terdiri dari 19 Kab/Kota, memiliki potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda perekonomian di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulau-pulau kecil.

Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan luas keseluruhan 27.511 ha. Ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di daerah pantai.

### **1.7.1. Permasalahan Utama (Strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi**

Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat dijelaskan antara lain ;

- a. Permasalahan di bidang budidaya ikan baik di air tawar, payau dan laut adalah ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di BBI maupun UPR. Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya, belum optimalnya pembinaan dan pelatihan CBIB serta masih adanya hama dan penyakit ikan
- b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas perairan di wilayah penangkapan di zona I pantai Barat Pulau Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya, dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat tangkap yang dimiliki nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan, regenerasi nelayan dan sebagainya.
- c. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah

- armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga diakibatkan karena kurangnya ketertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan teknologi yang sederhana.
- d. Terbatasnya sarana pengawasan dilaut, untuk mengawasi wilayah laut dengan luas 51.060,23 km<sup>2</sup>. Khusus bidang penangkapan, agresifitas nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Selanjutnya kegiatan illegal fishing masih marak dilakukan di Perairan Danau yaitu Danau Singkarak.
  - e. Keberadaan sentra perikanan di perairan tetangga seperti di daerah Kampar yang berdekatan dengan Sumatera Barat bias menjadi peluang sekaligus ancaman bagi perikanan budidaya di Sumatera Barat. Hal yang menjadi peluang lainnya adalah terdapatnya UPT Pusat BBAT Jambi yang dapat berkontribusi dalam Pengembangan Perikanan Budidaya
  - f. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik di pasar regional, Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
  - g. Invasi pelaku luar, baik yang diundang dalam rangka peningkatan motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna dari Muara Baru, Bali dan Gorontalo, maupun dugaan praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai akan tetap menjadi kerugian yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya, baik karena bertambahnya kuantitas invasi tersebut pada suatu sisi dan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya ikan sisi lainnya.

h. Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan dari Sumatera Barat telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. Hal diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Strutur Organisasi, Sumber Daya Manusia
- b. Aspek Strategis Organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

### a). Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

### b). Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel)

### c). Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### d). Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II**
- 2) Lain-lain yang dirasa perlu**



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Sumatera Barat. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program supaya mampu eksis dan unggul dan bersaing semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan kebutuhan sektor pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaannya seperti: a) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai dengan PERPRES Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010, b) RENSTRA KKP RI (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tanggal 18 Februari 2010, c) RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2025, d) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5

tahun. Secara ringkas Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

### 2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

#### a. Tujuan :

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th		- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th
			Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
			Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) - Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

#### b. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan indikator :
  - a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun 2021
  - b. Pendapatan Pembudidaya Ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/th pada tahun 2021

2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator :
  - a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80% pada tahun 2021
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator :
  - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar ton pada tahun 2021
  - b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
  - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A

Secara lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.1.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	1 Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1 Jumlah Pendapatan Nelayan	Rp/org/th	24.000.000	33.600.000	34.800.000	36.000.000	37.200.000	38.400.000
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidayaan Ikan ... Rp/org/th		2 Jumlah pendapatan pembudidayaan ikan	Rp/org/th	38.400.000	40.800.000	43.200.000	45.000.000	47.400.000	49.800.000
			2 Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	1 Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	%	52	57	58	70	75	80

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

			3	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	146,30	147,76	149,24	150,73	152,24	153,76
					2 Konsumsi Ikan	Kg/kap/th	36,42	36,53	36,63	37,00	38,00	39,00
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A
					2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	-	-	-

### 2.1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat, maka dilaksanakan program/atau kegiatan sebagai berikut:

#### I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
  - b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - c. Mitigasi Bencana Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan sub kegiatan :
  - a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil
  - b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - c. Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

#### II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai 30 GT dengan sub kegiatan:



- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT
  - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan sub kegiatan:
    - a. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan:**
1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
    - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
  2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
    - b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di air Payau dan Air tawar yang Penggunaan Sumber Dayanga Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan atau Manfaat atau dampak Negatifnya
    - c. Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
    - e. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Laut
- IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan:**
1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 Mil dengan sub kegiatan:
    - a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil
    - b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil

- c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
  - 2.** Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
    - a. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
- V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan:**
- 1.** Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - 2.** Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub kegiatan:
    - a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
    - b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing
  - 3.** Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
    - a. Pemberian Insentif dan fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

## **2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021.

## **2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

**Tabel. 2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/Th) 2. Jumlah Pendapatan pembudidaya ikan ( Rp/org/Th)	38.400.000,- 49.800.000,-
2.	Terwujudnya pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	1. Persentase Kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing (%)	80 %
3.	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) 2. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	153,76 39
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,10)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.280.980.582,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.815.131.757,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.390.359.182,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.703.750.620,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.055.181.325,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	2.381.459.311,-	APBD
7.	Sekretariat Jenderal (01)	426.882.000,-	APBN - DK
8.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	298.688.000,-	APBN - DK
9.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	412.117.000,-	APBN - DK

<b>LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)</b>	<b>TAHUN 2021</b>
---	-----------------------

10.	Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)	160.202.000,-	APBN – DK
11.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)	117.455.000,-	APBN – DK
12.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07)	258.520.000,-	APBN - DK

**BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hingga Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut :



**Tabel 3.1. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Predikat
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100 %	Sangat Baik
3.	> 75 % - 85 %	Baik
4.	> 55% - 75 %	Cukup
5.	Kurang dari 55 %	Kurang Baik

### B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

**TABEL 3.2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	38.400.000	40.452.555	105,35
		- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th	49.800.000	49.922.320	100,25
2	Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)	80	84,34	105,43
3	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	153,76	230,62	149,99
		- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	39,00	40,40	103,59
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,10)	A( 81,21)	101,39
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>111,00</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui rata-rata pencapaian dari 4 sasaran strategis tercapai 111,00% termasuk keberhasilan memuaskan. Pencapaian Sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 6 indikator kinerja. Indikator kinerja

tertinggi adalah indikator nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dengan capaian 149,99% terdapat pada sasaran meningkatnya pemasaran hasil perikanan dengan kategori memuaskan



### C . Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>2.1</b>	<b>Tujuan 1</b>	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
------------	-----------------	--

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu :

- 1). Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th),
- 2) Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th).

Perkembangan pencapaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	1. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)	40.452.555	38.400.000	105,35
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	49.922.320	49.800.000	100,25

Pencapaian tujuan tersebut juga dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada tabel 3.4.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Peningkatan Tahun 2020-2021 %
		2020	2021	
1.	Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th	39.650.250	40.452.555	2,02
2.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th	43.504.570	49.922.320	14,75

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Sedangkan pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata-rata per kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi 2 indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan 1, dua indikator yang sudah tercapai.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan telah ditetapkan dengan 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>2.1.1</b>	<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan</b>
--------------	------------------	---

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.

Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 7.700 Ha, potensi jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha yang terdiri dari komoditi unggulan nila, mas, lele, gurami dan kerapu.

Teknologi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ikan telah berkembang dari waktu ke waktu.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan baik melalui APBD maupun APBN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik masyarakat Kelautan dan Perikanan dari garis kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri disektor ekonomi.

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2016 - 2021 yaitu “ Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah pendapatan nelayan dengan target : Rp.38.400.000,- org/th
2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 49.800.000,- org /thn

### 2.1.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori
1.	Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th	38.400.000	40.452.555	105,35	Memuaskan
2.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th	49.800.000	49.922.320	100,25	Memuaskan

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 target dari indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan sebesar Rp. 38.400.000/org/th dapat terealisasi sebesar Rp. 40.452.555/org/th dengan tingkat capaian sebesar 105,35% termasuk kategori memuaskan.

1). Indikator kinerja sasaran I yaitu Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 208.594,3 ton dan perairan umum sebesar 10.976 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 219.570,3 ton pada tahun 2021. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya.

**TABEL 3.6 PENDAPATAN NELAYAN TAHUN 2021**

TRIWULAN	PRODUKSI (TON)	HARGA RATA-RATA PER KG	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	BIAYA PRODUKSI (Rp.000)	PENERIMAAN (Rp.000)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp.000)	Pendapatan Nelayan (Rp.000)	Jumlah Nelayan	
I	46,002.41	27,630.00	1,271,046,588	381,313,976	889,732,612	489,352,936	400,379,675	43,555	
II	45,817.38	28,450.00	1,303,504,461	391,051,338	912,453,123	501,849,217	410,603,905	43,555	
III	57,119.88	28,700.00	1,639,340,556	491,802,167	1,147,538,389	688,523,034	459,015,356	43,555	
IV	59,654.63	29,450.00	1,756,828,854	527,048,656	1,229,780,197	737,868,118	491,912,079	43,555	
<b>Jumlah</b>				<b>1,791,216,138</b>	<b>4,179,504,321</b>	<b>2,417,593,306</b>	<b>1,761,911,015</b>		
	Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)						1,761,911,015	40,452.555	
	Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)						146,825,918	3,371.046	
	Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)						2,417,593,306		
	Pendapatan Pemilik Kapal Perbulan (Rp.000)						201,466,109		



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan diperairan umum yaitu dengan cara penebaran benih ikan di perairan umum (danau dan sungai). Hal ini telah memberi dampak terhadap peningkatan produksi ikan di perairan umum sehingga pendapatan nelayan di perairan umum juga meningkat. Selanjutnya adalah memberikan bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Dalam 2 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut:

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Jaring	143 unit	190 unit
2.	Mesin	63 unit	448 unit
3.	Fish Box	48 unit	1.110 unit
	<b>Total</b>	<b>254 unit</b>	<b>1.748 unit</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat ada peningkatan bantuan yang diberikan ke nelayan sehingga memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Dengan bantuan mesin jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh dan dengan bantuan jaring yang baru dan kuat, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan.

2). Untuk indikator kinerja peningkatan pendapatan pembudidaya dari target Rp. 49.800.000/org/th terealisasi sebesar Rp. 49.922.320/org/th dengan capaian 100,25% dengan kategori sangat baik hal ini dapat dilihat pada tabel 3.7.dibawah ini:

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

## PENDAPATAN PER PEMBUDIDAYA TAHUN 2021

No	Jenis usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	pendapatan (Rp.000)	Pendapatan/org (Rp.000)
1	Kolam	205.847.44	4,528,643,680.00	81,229	2,490,754,024.00	2,037,889,656.00	25,088.20
2	Keramba	5,709.76	125,614,720.00	739	94,211,040.00	31,403,680.00	42,494.83
3	Sawah	2,112.31	42,246,200.00	3,168	21,123,100.00	21,123,100.00	6,667.65
4	Jaring Apung	19,404.02	388,080,400.00	2,180	291,060,300.00	97,020,100.00	44,504.63
5	Jaring Tancap Tawar	1,299.76	28,594,720.00	298	17,156,832.00	11,437,888.00	38,382.17
6	Kolam Air Deras	24,937.10	548,616,200.00	1,792	411,462,150.00	137,154,050.00	76,536.86
7	Tambak	2,200.00	176,000,000.00	301	132,000,000.00	44,000,000.00	146,179.40
8	Budidaya laut	63.00	9,450,000.00	121	7,087,500.00	2,362,500.00	19,524.79
	<b>Jumlah</b>	<b>261,573.39</b>	<b>5,847,245,920.00</b>	<b>89,828</b>	<b>3,464,854,946</b>	<b>2,382,390,974</b>	<b>399,378.54</b>
	<b>Pendapatan per jenis usaha tahun 2021</b>						<b>49,922.32</b>
	<b>Pendapatan per org/bln tahun 2021</b>						<b>4,160.19</b>

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3 - 4 kali dalam setahun. Jumlah produksi yang didapat pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai jual perjenis ikan budidaya tersebut dikurangi dengan biaya produksi. Atau uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidaya ikan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi. Adapun jumlah produksi budidaya sebesar 261.573,39 ton pada tahun 2021, jumlah pembudidaya ikan 89.828 orang, sedangkan data produksi budidaya tahun 2020 sebesar 247.798,60 ton dan jumlah pembudidaya ikan 85.725 orang.

Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan pembudidaya ikan yaitu dengan pembinaan dilapangan:

- 1) Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat.
- 2) Mendorong pembudidaya menggunakan pakan alternatif dengan program gerpari (Gerakan Pakan Mandiri). Pakan alternatif yang dibuat oleh pembudidaya ikan dapat menekan biaya produksi.
- 3) Mendorong pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- 4) Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas

Peluang untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan adalah :

1. Lahan budidaya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar (kolam air deras dan kolam mina padi dan budidaya secara intensif) dapat menjadi peluang.
2. Meningkatnya jumlah pemdudidaya dari tahun sebelumnya 85.725 orang tahun 2020 menjadi 89.828 orang tahun 2021. Pertumbuhan budidaya tambak turut meningkatkan jumlah pembudidaya, dimana tahun 2020 (60 orang), di tahun 2021 menjadi 90 orang.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

### 2.1.1.2 Perbandingan antar Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator sasaran 1 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 – 2021**

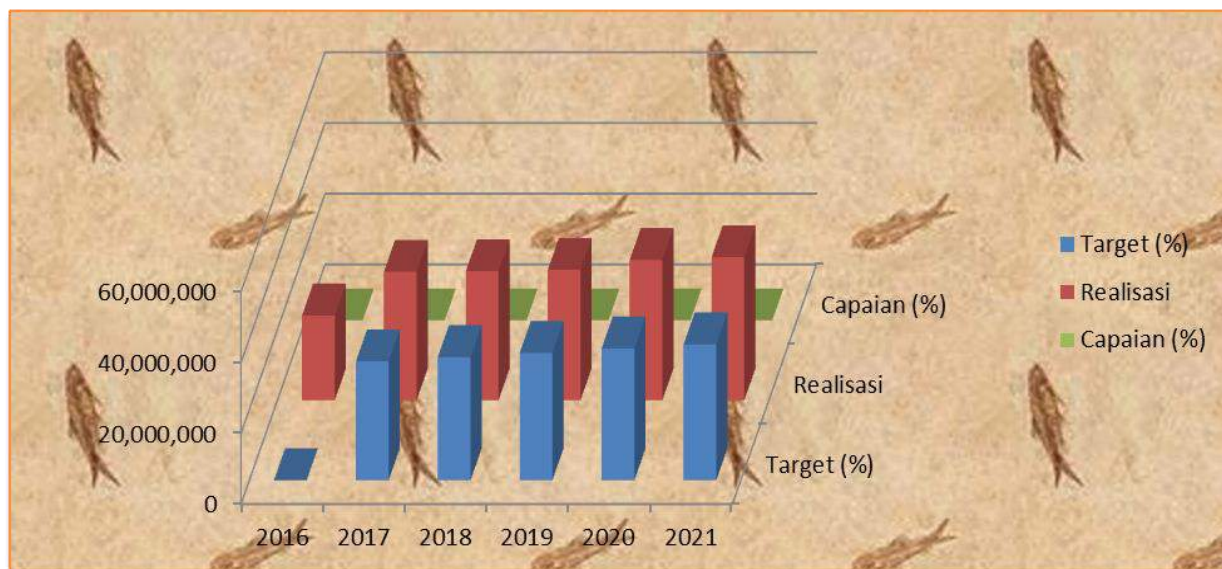
No.	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020			2021 *		
		Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	-	24.000.000	-	33.600.000	36.316.800	108,09	34.800.000	36.500.000	104,89	36.000.000	36.850.000	102,36	37.200.000	39.650.250	106,59	38.400.000	40.452.555	105,35
2.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	-	38.400.000	-	40.800.000	40.800.000	100	43.200.000	43.500.000	100,69	45.000.000	45.500.000	101,11	47.400.000	43.504.570	91,78	49.800.000	49.922.320	100,25

Data Tahun 2021 merupakan angka sementara

Jika dilihat dari indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya, Capaian kinerja tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena target tahun 2016 – 2021 awalnya tidak ada sasaran meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 2 indikator kinerja, karena terjadinya revisi sasaran dan indikator kinerja dari tahun 2016. Tetapi walaupun tidak ada data targetnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai data tentang jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan. Mulai Tahun 2018 capaian sudah dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Capaian tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

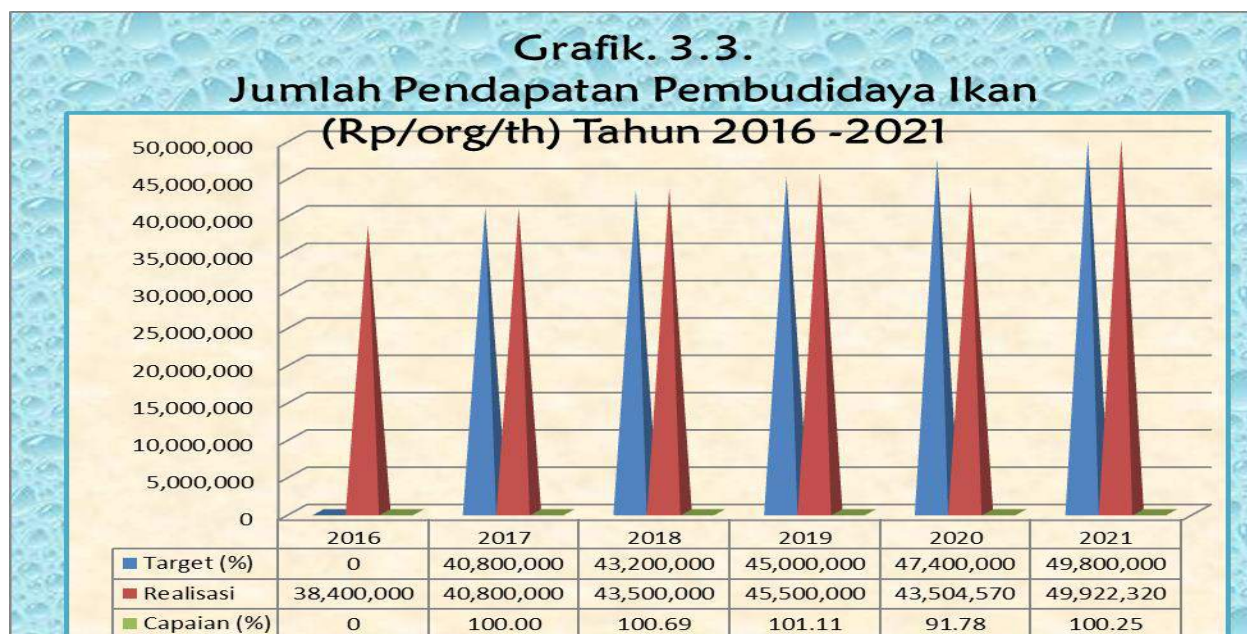
Dari realisasi jumlah pendapatan nelayan tahun 2016 sebesar Rp.24.000.000,- (Rp/org/th) hingga tahun 2021 realisasinya sudah tercapai sebesar Rp.40.425.555,- (Rp/org/th). Hal ini dapat dilihat dari grafik 3.2. dibawah ini :

**Grafik 3.2. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) Tahun 2016 - 2021**



Dilihat dari grafik diatas bahwa jumlah pendapatan nelayan pada tahun 2016 - 2021 adanya peningkatan dan hasilnya memuaskan.

Jumlah pendapatan pembudidaya ikan tahun 2016 sebesar Rp.38.400.000,- (Rp/org/th) hingga tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.49.922.320,-(Rp/org/th) dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian pendapatan pembudidaya tahun 2021 kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari grafik 3.3 dibawah ini:





### 2.1.1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

**Tabel 3.9. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2021 terhadap 2021
1.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	40.452.555	38.400.000	105,34
2.	Jumlah Pendapatan pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	49.922.320	49.800.000	100,25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan nelayan tahun 2021 sebesar Rp.40.452.555- org/th dengan capaian sebesar 105,34% dari target akhir Renstra tahun 2021 yakni sebesar Rp.38.400.000.-org/th Sedangkan Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan tahun 2021 sebesar Rp.49.922.320,- org/thn dengan capaian 100,25% dari target akhir Renstra tahun 2021 yakni sebesar Rp.49.800.000,- org/th.

### 2.1.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

**Tabel 3.10. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional *	Capaian (%)
1.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	40.452.555	52.236.660	77,44
2.	Jumlah Pendapatan pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	49.922.320	52.404.216	95,26

\*Angka sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

### 2.1.1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan sebesar Rp. 40.452.255- org/th dengan tingkat capaian 105,34% dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan yaitu sebesar Rp.49.922.320,- org/th dengan capaian 100,25%. Capaian indikator kinerja pendapatan nelayan dan indikator pendapatan

pembudidaya ikan memuaskan, hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Memberikan bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan
2. Memberikan bantuan benih dan pakan kepada kelompok pembudidaya ikan
3. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Peningkatan akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya ikan
5. Diversifikasi usaha nelayan dan pembudidaya ikan
6. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota
7. Meningkatkan kemampuan SDM nelayan dan pembudidaya ikan

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB dan CPIB serta teknologi dalam budidaya.
2. Terbatasnya modal usaha, sehingga sarana prasarana menjadi terbatas.
3. Pemasaran yang sifatnya masih lokal dan regional membuat pembudidaya kurang berkembang.

#### 2.1.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan adalah sebesar Rp.29.094.109.802,- dan terealisasi Rp.25.580.821.672,-(87,92%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.3.513.288.130,- sasaran ini didukung oleh 2 program yaitu 1) Program Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan uraian tabel.3.11 dibawah ini:

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan yang Mendukung	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/bln/thn)	<b>I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>25,390,359,182</b>	<b>22,074,484,363</b>	<b>86.94</b>
	1 <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>21,021,419,482</b>	<b>18,101,099,616</b>	<b>86.11</b>
2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/bln/th)	a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	58,032,432	50,683,200	87.34
	b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

		20,963,387,050	18,050,416,416	86.10
	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Bidang P.Tangkap)	14,508,917,745	13,861,360,410	95.54
	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (PPW I)	3,518,933,400	1,689,474,768	48.01
	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (PPW II)	2,753,455,880	2,318,856,234	84.22
	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (PPW III)	182,080,025	180,725,004	99.26
2	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1,747,016,700</b>	<b>1,395,613,000</b>	<b>79.89</b>
a.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,747,016,700	1,395,613,000	79.89
3	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>252,336,000</b>	<b>220,058,600</b>	<b>87.21</b>
a.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	97,336,000	76,158,600	78.24
b.	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	155,000,000	143,900,000	92.84
4	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>2,369,587,000</b>	<b>2,357,713,147</b>	<b>99.50</b>
a.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (PP W I)	804,568,000	794,008,600	98.69
b.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (PP W II)	1,008,655,500	1,008,541,047	99.99
c.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	556,363,500	555,163,500	99.78
II	<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</u></b>	<b>3,703,750,620</b>	<b>3,506,337,309</b>	<b>94.67</b>
	-			
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>39,350,000</b>	<b>38,274,922</b>	<b>97.27</b>
a.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	39,350,000	38,274,922	97.27
	-			
2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1,733,817,600</b>	<b>1,575,850,528</b>	<b>90.89</b>
a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1,393,576,600	1,258,015,600	90.27
b.	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kotadan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya	16,908,800	15,518,800	91.78
c.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151,451,400	143,855,400	94.98
d.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171,880,800	158,460,728	92.19
2.b	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (UPTD BPBALP)</b>	<b>1,438,557,760</b>	<b>1,401,274,161</b>	<b>97.41</b>
a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	631,178,800	620,873,261.30	98.37

	b.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	777,300,560	751,275,200	96.65
	c.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30,078,400	29,125,700	96.83
	2.c.	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (UPTD KPSDKP)</b>	<b>492,025,260</b>	<b>490,937,697.40</b>	<b>99.78</b>
	a.	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	492,025,260	490,937,697.40	99.78
	<b>Total</b>		<b>29,094,109,802</b>	<b>25,580,821,672</b>	<b>87.92</b>

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 1 (satu) Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan terdiri dari 5 program yaitu 1). Program ; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan jumlah dana sebesar Rp.25.390.359.182,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 22.074.484.363,- (86,94%), 2).Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan dukungan dana sebesar Rp.3.703.750.620,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.506.337.309,- (94,67%)

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 1 (Satu) ini adalah Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya hasil penangkapan ikan di laut dan hasil pembudidaya ikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungannya.

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	105,35%	86,94%	18,41%
	- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	100,25%	94,67%	5,58%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian kinerja dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan

yang mendukung sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan dengan capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org./th) sebesar 105,35% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 86,94% telah mengefisieni penggunaan sumberdaya sebesar 18,41%. Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th) dengan capaian kinerja 100,25% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,67% telah mengefisieni penggunaan sumberdaya sebesar 5,58% .

<b>2.1.2</b>	<b>Sasaran 2</b>	Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
--------------	------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dengan target 80%.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terjadi perubahan Kewenangan dimana Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut 0 - 4 mil yang semula merupakan Kewenangan Kab/Kota, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan wilayah laut dan pengawasan 0 - 12 mil menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga seluruh pengelolaan wilayah laut di perairan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kewenangan Provinsi dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan.

### 2.1.2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.13 sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)	80	84,34	105,43	Memuaskan

Ket : T= Target, R= Realisasi

Indikator kinerja sasaran 2 yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dari target 80 % terealisasi sebesar 84,34% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,43% nilai ini termasuk kategori memuaskan. Capaian kinerja diatas diperoleh dari jumlah kapal yang mempunyai dokumen lengkap dibagi dengan jumlah kapal yang diperiksa melalui kegiatan operasional pengawasan baik di laut maupun perairan umum.

Realisasi indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing pada tahun 2021 dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (\%)} &= \frac{\text{Jumlah kapal yang mempunyai dokumen lengkap}}{\text{Jumlah kapal yang diperiksa}} \times 100 \\
 &= \frac{447}{530} \times 100 \\
 &= 84,34\%
 \end{aligned}$$

Selama Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan oleh Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 530 kapal baik yang diperiksa diperairan laut maupun diperairan umum. Pelanggaran yang dilihat adalah tidak memiliki dokumen atau terdaftar (didominasi oleh kapal-kapal izin daerah), pelanggaran terhadap ketidak sesuaian izin dan daerah penangkapan, serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-surat

yang di perlukan. Terhadap kapal-kapal yang belum laik operasi (belum memiliki dokumen lengkap) diberikan rekomendasi tindakan perbaikan (Corrective Action) untuk melengkapi kekurangan dokumen. Pengawasan dilakukan diwilayah perairan Sumatera Barat bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan ini dilakukan di wilayah perairan laut Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan KP. Tenggiri, KP Todak, SP.Cinta Laut dengan mengawasi wilayah laut 7 Kab/Kota wilayah pesisir. Dari 530 kapal yang diperiksa, diperoleh 447 kapal yang mempunyai dokumen lengkap dan yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 83 kapal. Dengan demikian persentase nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu kapal yang mempunyai dokumen lengkap sebanyak 447 dibagi dengan jumlah kapal yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 530 kapal maka diperoleh hasilnya sebanyak 84,34%.

**Tabel 3.14. Data Hasil Pemeriksaan oleh Kapal Pengawas (Patroli) DKP Sumbar Tahun 2021**

<b>TRIWULAN I</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA KAPAL</b>	<b>JUMLAH KAPAL YANG DIPERIKSA</b>	<b>DOKUMEN LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>
1	KP.TENGGIRI	55 kapal	44 kapal	11 kapal
2	KP.TODAK	18 kapal	16 kapal	2 kapal
3	SP.CINTA LAUT	29 kapal	24 kapal	5 kapal
	<b>Jumlah Triwulan I</b>	<b>102 kapal</b>	<b>84 kapal</b>	<b>18 kapal</b>
<b>TRIWULAN II</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA KAPAL</b>	<b>JUMLAH KAPAL YANG DIPERIKSA</b>	<b>DOKUMEN LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>
1	KP.TENGGIRI	55 kapal	47 kapal	8 kapal
2	KP.TODAK	34 kapal	29 kapal	5 kapal
3	SP.CINTA LAUT	68 kapal	60 kapal	8 kapal
	<b>Jumlah Triwulan II</b>	<b>157 kapal</b>	<b>136 kapal</b>	<b>21 kapal</b>
<b>TRIWULAN III</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA KAPAL</b>	<b>JUMLAH KAPAL YANG DIPERIKSA</b>	<b>DOKUMEN LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>
1	KP.TENGGIRI	28 kapal	23 kapal	5 kapal
2	KP.TODAK	15 kapal	14 kapal	1 kapal
3	SP.CINTA LAUT	83 kapal	81 kapal	2 kapal
	<b>Jumlah Triwulan III</b>	<b>126 kapal</b>	<b>118 kapal</b>	<b>8 kapal</b>

NO.	NAMA KAPAL	TRIWULAN IV		
		JUMLAH KAPAL YANG DIPERIKSA	DOKUMEN LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	KP.TENGGIRI	67 kapal	42 kapal	25 kapal
2	KP.TODAK	27 kapal	20 kapal	7 kapal
3	SP.CINTA LAUT	51 kapal	47 kapal	4 kapal
	<b>Jumlah Triwulan IV</b>	<b>145 kapal</b>	<b>109 kapal</b>	<b>36 kapal</b>
	<b>Jumlah Triwulan I,II,III dan IV</b>	<b>530 kapal</b>	<b>447 kapal</b>	<b>83 kapal</b>

**2.1.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

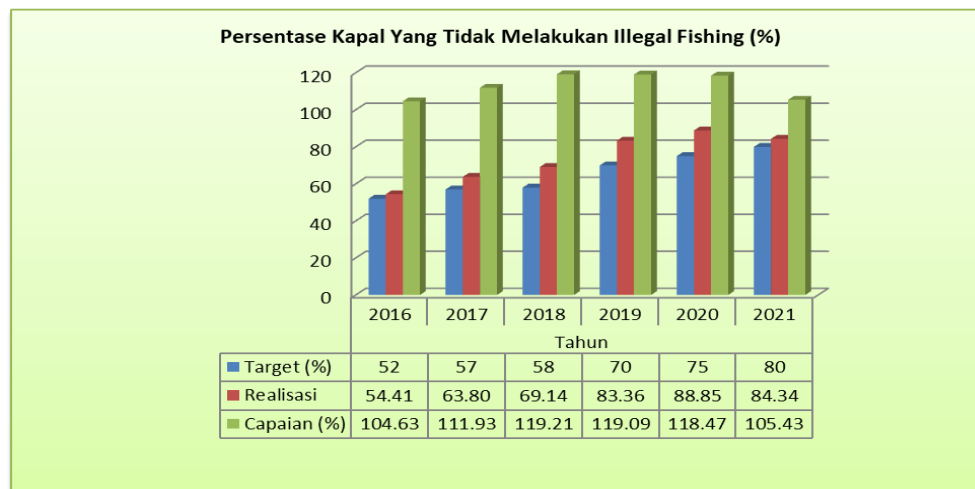
# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

**Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 -2021**

No.	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)	52	54,41	104,63	57	63,80	111,93	58	69,14	119,21	70	83,36	119,09	75	88,85	118,47	80	84,34	105,43

Untuk indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing capaian memuaskan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 119,21%, dari sasaran yang telah ditargetkan, Pada tahun 2021 capaian sebesar 105,43 termasuk kategori Memuaskan, Dilihat dari target dan realisasi dari tahun 2016 s/d 2021 bahwa persentase kapal yang tidak melakukan illegal fishing termasuk keberhasilan memuaskan. Dapat dilihat pada grafik 3.4. berikut:

Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik 3.4 dibawah ini:





### 2.1.2.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

**Tabel 3.16. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2021 terhadap 2021
1.	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing %	84,34	80%	105,43

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing tahun 2021 sebesar 84,34 % dengan capaian sebesar 105,43% dari target akhir Renstra tahun 2021. Capaian ini masih termasuk kategori memuaskan.

### 2.1.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

**Tabel 3.17. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Capaian (%)
1.	Persentase Kapal Nelayan yang Tidak Melakukan Illegal Fishing (%)	84,34%	-	-

Pengukuran indikator kinerja Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing tidak dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga capaian kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan capaian nasional.

### 2.1.2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing dengan realisasi 83,34% dan capaiannya sebesar 105,43% hal ini adalah karena upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Melakukan operasi pengawasan laut dan perairan umum daratan secara rutin dan berkelanjutan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha perikanan baik itu masyarakat nelayan, pengolah atau pedagang ikan, pembudidaya ikan terkait peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

- c. Meningkatkan SDM personil pengawas perikanan/PPNS yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya mentaati aturan yang berlaku terkait pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan konkrit dilapangan adalah dengan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Kelautan ,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan APBD seperti: 1). Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan melakukan operasional pengawasan dilaut dan perairan umum secara terpadu dengan Instansi terkait. Dengan adanya operasional ini maka berkurangnya kegiatan penangkapan yang menggunakan bahan dan alat yang dilarang sehingga persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) sebanyak 84,34% dengan capaian 105,43% dengan katagori memuaskan, hal ini menggambarkan meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah menimbulkan kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya mentaati aturan yang berlaku terkait pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini maka dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian untuk indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu:

- Aplikasi dalam pembuatan surat izin usaha perikanan masih baru, jadi belum semua pelaku usaha perikanan mengetahuinya atau memahaminya.
- Sarana dan prasarana pengawasan di laut kurang memadai.

### 2.1.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yang mendukung sasaran 2 ini dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting di dukung oleh 2 program dan beberapa kegiatan APBD dengan pagu anggaran Rp.6.870.312.482,- dan realisasi anggaran mencapai 94,21% atau sebesar Rp.6.472.716813,- dengan tabel 3.18. dibawah ini:

Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan yang Mendukung	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)	I. <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	2,055,181,325	2,019,002,234	98.24
	1 <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	1,948,212,825	1,913,625,114	98.22
	a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	99,943,050	95,456,021	95.51
	b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1,628,313,775	1,602,733,725	98.43
	c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	219,956,000	215,435,368	97.94
	2 <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	106,968,500	105,377,120	98.51
	a. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	106,968,500	105,377,120	98.51
	II. <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	4.815,131,157	4.453.714.579	92.49
	1 <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	434,263,500	402,398,693	92.66
	a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	58,640,000	36,329,850	61.95
	b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,370,000	220,179,151	97.70
	c. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150,253,500	145,889,692	97.10

<b>LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)</b>	<b>TAHUN 2021</b>
---	-----------------------

	<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>176,971,400</b>	<b>159,922,321</b>	<b>90.37</b>
	a.	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	115,995,000	103,665,350	89.37
	b.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34,836,400	34,070,971	97.80
	c.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26,140,000	22,186,000	84.87
		<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UPTD KPSDKP)</u></b>	<b>4,203,896,257</b>	<b>3,891,393,565.35</b>	<b>92.57</b>
	1	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>4,203,896,257</b>	<b>3,891,393,565.35</b>	<b>92.57</b>
	a.	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4,203,896,257	3,891,393,565.35	92.57
		<b>TOTAL</b>	<b>6,870,312,482</b>	<b>6,472,716,813</b>	<b>94.21</b>

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 2 (Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan terdiri dari 2 program yaitu 1). Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah dana sebesar Rp.2.055.181.325,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.019.002.234,- (98,24%) dan 2). Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jumlah dana sebesar Rp.4.815.131.157,- realisasi keuangan Rp.4.453.714.579,- (92,49%).

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 3 ini adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Hal ini juga dapat dilihat dari tabel 3.19. efisiensi penggunaan sumberdaya:

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan ilegal fishing (%)	105,43%	94,21%	11,22%

Program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang capaian indikator kinerja Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing begitupun dengan kegiatan pada masing - masing program. Capaian indikator kinerja ini sebesar 105,43 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,21% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 11,22%

<b>2.1.3</b>	<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan</b>
--------------	------------------	---

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran)

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016 – 2021 yaitu “Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target 153,76 milyar
2. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/th

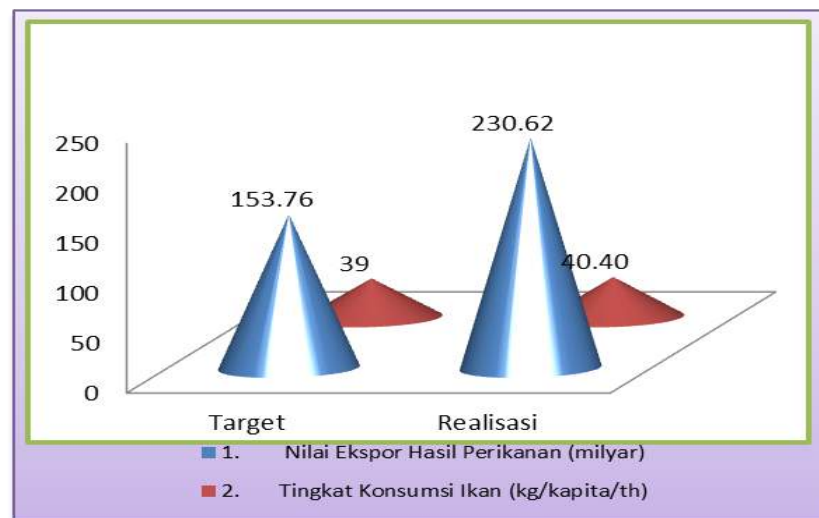
**2.1.3.1. Perbandingan antara Target dengan realisasi Kinerja**

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.20 sebagai berikut :

**Tabel 3.20 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	153,76	230,62	149,99	Memuaskan
2. Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	39	40,40	103,59	Memuaskan

**Grafik. 3.5.**



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 3 pada tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa semua capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Semua capaian termasuk dalam kategori memuaskan. Uraian capaian indikator kinerja tersebut adalah : Nilai Ekspor hasil perikanan (milyar) tingkat capaiannya 149,99% dengan kategori memuaskan. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) tingkat capaiannya 103,34% dengan kategori memuaskan.

### 2.1.3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Capaian Indikator sasaran 3 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.21 berikut :

**Tabel 3.21. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016 – 2021**

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	146,3	206,16	140,92	147,8	206,58	139,81	149,2	209,57	140,42	150,7	234,55	155,60	152,2	165,12	108,46	153,76	230,62	149,99
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	36,42	36,42	100,00	36,53	40,34	110,43	36,63	38,97	106,39	37	40,25	108,78	38,00	39,27	103,34	39	40,40	103,59

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sudah melebihi target yaitu diatas 100% yaitu capaian tahun 2019 sebesar 155,60%, capaian tahun 2021 sebesar 149,99%, tahun 2016 sebesar 140,92%, tahun 2017 sebesar 139,80,tahun 2018 yaitu sebesar 136,10% sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 108,46%. Target indikator kinerja sasaran 3 ini sudah tercapai dan termasuk kategori memuaskan.



Nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini :

**Grafik 3.6**  
**Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar) Tahun 2016 – 2021**



Tingkat konsumsi ikan perkapita mengalami peningkatan setiap tahun dari 2016 s/d 2021 bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita meningkat dari target yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program-program peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (supply) hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau (accessibility) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan (consumption) hasil perikanan. Dilihat dari indikator kinerja pada sasaran meningkatnya pemasaran hasil perikanan dimana peningkatan kinerja dari tahun – ketahun diperoleh capaian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.7. berikut:

Grafik 3.7  
Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021



### 2.2.1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.22. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2021	Capaian 2021 terhadap 2021
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	230,62	153,76	149,99
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	40,40	39	103,59

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) pada tahun 2021 sebesar 230,62 milyar telah mencapai 149,99% dari target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 153,76 milyar. Sedangkan Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2021 sebesar 40,40 kg/kapita/th telah mencapai 103,59% dari target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 39 kg/kapita/th. Capaian ini masih termasuk memuaskan. Nilai ekspor hasil perikanan diambil dari jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar,

dingin maupun olahan. Jenis komoditi yang dominan untuk di ekspor yaitu tuna, frozen tuna, lobster, layur segar, tenggiri dan lain-lain..

**2.1.3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

**Tabel 3.23. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Capaian (%)
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	230,62	7.000	3,29
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kp/kapita/th)	40,40	54,50	74,13

\*angka sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

**2.1.3.5. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) sebesar 230,62 (milyar) dengan tingkat capaian 149,99% dan tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th) yaitu sebesar 40,40 kg/kap/th dengan capaian 103,59% hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain: mempromasikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada masyarakat antara lain: Rehabilitasi UPI, sarana olahan, vakum sealer, fish box serta SPG Roda 3, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan dari Sumatera Barat, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah.

Keberhasilan dari pencapaian sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari dana APBD maupun APBN. Program - program yang dilaksanakan antara lain adalah :

## 1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini capaian kinerjanya memuaskan, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran 3 melalui capaian indikator kinerja, uraian capaian indikator kinerja yang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

### *a. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan (ton).*

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable).

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan akan berperan dalam pengembangan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta jangkauan pemasaran produk hasil perikanan dalam rangka menjaga stabilitas produksi serta ketahanan pangan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan, sasaran ke 3 yang akan diwujudkan yaitu “ Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikanan’

Negara tujuan ekspor pada Tahun 2021 yaitu USA, Bangkok, Guangzhoo, Hongkong, Singapura, Miami, Los Angeles, Tokyo, Manila, Taipie, Canada, India, Malaysia, Thailand, Jepang, China, Amerika. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai ekspor hasil perikanan antara lain standarisasi produk ekspor hasil perikanan dan sosialisasi dan peningkatan sarana pemasaran ikan serta peningkatan investasi dan akses permodalan.

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Data tabel ekspor dapat dilihat pada tabel 3.24 dibawah ini:

DATA EKSPOR  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2021

No	Jenis	Bulan												Total (kg)	Total	Harga	Tujuan Pengiriman
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Harga	Rata-rata	
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg		(Rp.)	(kg)	
1	Tuna	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,108	7,831,899,967	389,492	USA
2	Ikan Hias Laut	64	0	64	0	72	0	0	0	0	0	0	0	200	574,000,000	2,870,000	Jepang
3	Ikan Bilih kering	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450,000	450,000	Tokyo
4	Ikan Sepat Kering, Ikan Teri Kering, Ikan kering acah, Belut Kering	0	10	11	15	0	5	0	3	0	7	0	0	51	17,510,000	343,333	Jepang, Malaysia, Thailand, USA
5	Frozen Tuna	0	0	20,453	19,541	0	21,776	0	0	20,684	20,884	5	20,098	123,441	17,026,234,650	137,930	Perth, New York, Jepang
6	Cupang	0	18	34	0	0	36	0	0	0	0	0	0	88	154,130,000	1,751,477	Jepang
7	Tanaman Air	0	0	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0	400	30,000,000	75,000	Kuala Lumpur
8	Ikan Kerapu	0	0	0	0	0	0	0	0	53,603	0	0	0	53,603	2,144,100,000	40,000	Canada
9	PPS BUNGUS	21,395	38,101	39,642	33,596	30,567	32,568	33,780	37,889	31,110	63,028	35,776		397,452	11,181,472,000	28,133	Malaysia
	Ikan Keluar																
11	Ikan Layang Segar	115,430	73,870	41,560	20,776	21,776	19,778	20,188	19,445	21,775	20,775	19,885	21,778	417,036	6,935,467,000	16,630	Jakarta, Pekanbaru, Pontianak
12	Ikan Tenggiri segar	59,968	40,312	51,320	50,320	48,556	47,550	50,112	49,771	43,778	44,886	45,991	43,552	576,116	11,871,231,000	20,606	Batam, Jakarta, Pekanbaru, Surabaya, Bajar masin
13	Ikan Layur segar	65,781	47,639	27,861	44,660	43,778	37,556	36,125	35,231	34,240	36,440	35,991	34,221	479,523	10,712,654,700	22,340	Sibolga, Jakarta
14	Ikan Tongkol Segar	46,080	26,140	25,890	54,889	42,334	36,778	35,112	36,789	43,789	40,567	42,778	40,112	471,258	7,835,076,100	16,626	Bali, Dumai, Belawan, Jakarta, Surabaya
15	Lobster	1,712	1,623	1,947	2,560	4,032	2,678	3,076	3,022	3,446	22,089	21,057	21,023	88,265	13,422,120,000	152,066	Jakarta, Dumai, Medan, Surabaya, Belawan, Dumai, Palembang
16	Lobster Air Tawar	1,669	1,564	-	1,778	1,345	1,587	-	1,776	1,338	-	1,670	1,554	14,281	254,870,000	17,847	Jambi, Bali, Surabaya, Makasar, Palembang
17	Ikan Hias Laut	3,856	5,778	4,678	3,736	3,667	4,781	5,721	5,778	5,789	6,885	7,534	7,889	66,092	7,076,890,000	107,076	Pekanbaru, Jambi, Batam, Bali, Surabaya, Medan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

18	Ikan Bilih kering	1,712	-	-	-	1,772	1,956	-	1,754	1,825	1,554	1,984	1,834	14,391	455,000,000	31,617	Belawan, Medan, Dumai, Jakarta
19	Ikan Selar segar	16,170	-	-	-	-	14,117	-	-	15,347	-	16,889	-	62,523	4,126,760,000	66,004	Surabaya
20	Gurita segar	8,100	7,600	9,560	-	-	8,995	7,889	-	-	-	9,776	-	51,920	2,345,766,000	45,180	Medan, Surabaya
21	Teripang	-	800	-	581	281	671	752	665	741	701	-	554	5,746	2,112,715,000	367,684	Medan, Surabaya, Dumai, Makasar, Bandung
22	Ikan Tuna beku	-	9,173	-	-	10,335	11,772	9,882	10,225	9,345	11,558	9,667	-	81,957	4,735,114,000	57,776	Bali
23	Ikan Cupang	-	445	-	-	5,446	5,112	-	-	1,578	-	4,911	-	17,492	425,342,000	24,316	Batam, Pontianak, Kalimantan Selatan, Makasar, Surabaya, Sabang, Makasar, Banjarmasin
24	Ikan Lainnya	6,986	5,981	7,892	9,332	5,678	4,887	2,777	4,542	6,123	5,762	7,889	5,781	73,630	85,273,997,100		

No	Jenis	Bulan												Total (kg)	Total	Harga	Tujuan Pengiriman
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Harga	Rata-rata	
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg		(Rp.)	(kg)	
25	PT. Sumber Laut) AWI /David Darat	5,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	56,000	1,998,000,000	35,679	Malaysia, Singapura VIA Medan
26	Syafrican (Pessel) Tongkol, Tenggiri, cakalang	5,000	6,000	5,000	4,000	5,000	4,000	5,000	6,000	5,000	5,000	6,000	6,000	62,000	2,230,000,000	35,968	Malaysia, VIA Medan
27	Junaidi (Pessel) Tongkol, Tenggiri, Cakalang,	10,000	10,000	8,000	8,000	9,000	8,000	10,000	9,000	10,000	10,000	9,000	9,000	110,000	4,065,000,000	36,955	Malaysia, Singapura VIA Palembang, Dumai, Medan
28	H Andre (Padang) Tongkol, Tenggiri, Layur	8,000	6,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	58,000	2,535,000,000	43,707	Malaysia VIA Dumai
29	Pendi (Padang) Tongkol, Tenggiri, Layur	8,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	56,000	2,365,000,000	42,232	Malaysia, Singapura VIA Dumai



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

30	H. Yudi Pendra (Pasaman Barat)Tongkol, Tenggiri, Cakalang	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	53,000	2,066,000,000	38,981	Malaysia, Singapura,Vietnam VIA Dumai
31	Agus Riadi (Pariaman) Tongkol, Tenggiri, Cakalang	12,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	126,000	4,920,000,000	39,048	Malaysia VIA Dumai
32	Masrizal.( Pasaman Barat) Tenggiri, Cakalang	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	28,000	855,000,000	30,536	Malaysia VIA Dumai
33	Adek Syahputra ( Pasaman Barat) Tongkol, Tenggiri, Cakalang	8,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	60,000	2,841,000,000	47,350	Malaysia, Singapura VIA Dumai
34	Grup Padang Rancak (Kenny ) Tongkol, Tenggiri, Layur	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,000	2,680,000,000	46,207	Malaysia,Cina,Singapura dan Vietnam VIA Jakarta
35	Mardi Ikwanis (Pasaman Barat) Bawal,Tenggiri	2,000	3,000	3,000	2,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	41,000	1,150,000,000	28,049	Malaysia VIA Dumai
36	Muthia Bayang ( Bayang Pasar Baru ) Tenggiri, Bawal, Tongkol	5,000	5,000	5,000	4,000	6,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	56,000	2,232,500,000	39,866	Malaysia, VIA Dumai
37	UD Karya Bersama ( Haji Anas, Tiku Agam ) Tenggiri, Bawal, Tongkol, Layur	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	108,000	4,140,000,000	38,333	Malaysia, Singapura, Vietnam VIA Dumai
	Jumlah	452,031	335,054	305,113	307,784	288,639	320,703	281,414	280,990	310,908	399,739	335,803	269,396	3,887,574	230,620,299,517		



<b>LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)</b>	<b>TAHUN 2021</b>
---	-----------------------

Keterangan :

Volume Ekspor Tahun 2020	2,149,628	Kg	
	2,149.63	Ton	
Nilai Ekspor Tahun 2021	Rp.	165,122,783,239	
	USD	11,794,484.52	(Nilai Rupiah dibagi 14.000)
Volume Ekspor Tahun 2021	3,887,574	Kg	
	3,887.57	Ton	
Nilai Ekspor Tahun 2021	Rp.	230,620,299,517	
	USD	16,472,878.54	(Nilai Rupiah dibagi 14.000)

*b. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsumsi Ikan*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi ikan mencakup ikan segar dan olahan dengan ketentuan dari BPS.

Metoda penghitungan angka konsumsi ikan menggunakan raw data Susenas berdasarkan pendekatan konsumsi dan pengeluaran pangan dalam rumah tangga karena metoda tersebut paling mendekati dalam penghitungannya sebab dilaksanakan secara reguler oleh BPS serta menyediakan data konsumsi pangan di dalam rumah tangga atau makan diluar rumah oleh seluruh anggota keluarga sehingga digunakan untuk menduga kuantitas yang sesungguhnya dikonsumsi.

Penghitungan konsumsi ikan dengan formula sebagai berikut:

$$AKI = A+B+C$$

- a. AKI : Angka konsumsi ikan
- b. A : Konsumsi rumah tangga (KIDRT)
- c. B : Konsumsi luar rumah tangga (%B\*A)
- d. C : Konsumsi tidak tercatat (%C\* (A+B))

Selanjutnya penentuan besarnya angka koreksi B (prosentase konsumsi diluar rumah) dan C (Prosentase konsumsi tidak tercatat) dapat dilakukan dengan: melakukan koordinasi dan meminta masukan dari Instansi terkait seperti: BPS, BKD (Badan Ketahanan Pangan Daerah), Bappeda, akademi dan pihak-pihak terkait.

Data angka konsumsi ikan (AKI) Tingkat Nasional dan Provinsi dikeluarkan/diterbitkan oleh Susenas sehingga untuk capaian angka konsumsi ikan tahun 2021 masih merupakan angka sementara, karena sedang dalam pengumpulan data oleh pihak-pihak terkait ditingkat Pusat. Data angka konsumsi ikan baik secara Nasional maupun Provinsi akan diperoleh pada bulan Oktober Tahun 2022.

Pada tahun 2021 target indikator tingkat konsumsi ikan adalah sebesar 39 (Kg/kapita/th) dan terealisasi sebesar 40,40 kg/kapita/tahun dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,59 kg/kapita/th (Memuaskan). Angka konsumsi ikan dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini:

Tabel 3.25. Angka Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Barat (Sementara)

No	Kab/Kota	Angka Konsumsi Ikan						
		KIDS	KIDA	KIMJ	KIDRT (A)	KLRT (B)	KTT (C)	AKI
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	44,67	1,19	1,97	47,83	2,87	3,55	54,25
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	31,34	2,91	1,1	35,35	5,3	4,07	44,74
3.	Kab. Solok	13,09	5,35	0,47	18,91	14,18	3,92	37,01
4.	Kab. Sijunjung	15,37	5,76	0,23	21,35	14,44	2,4	38,19
5.	Kabupaten Tanah Datar	17,08	7,38	0,69	25,16	5,79	8,05	39
6.	Kab. Padang Pariaman	25,54	2,63	3,5	31,68	8,17	3,98	43,83
7.	Kab. Agam	22,59	6,2	2,62	31,40	6,28	3,77	41,45
8.	Kab. Lima Puluh Kota	15,26	6,96	0,9	23,12	8,23	7,8	39,15
9.	Kab. Pasaman	18,35	6,72	0,39	25,46	11,3	1,56	38,32
10.	Kab. Solok Selatan	15,02	5,85	0,22	21,09	7,22	3,39	31,70
11.	Kab. Dharmasraya	16,55	5,91	0,74	23,20	6,96	6,26	36,42
12.	Kab. Pasaman Barat	23,26	4,89	1,30	29,18	10,51	1,98	41,67
13.	Kota Padang	20,18	2,74	2,25	25,17	13,08	2,98	41,23
14.	Kota Solok	17,14	6,2	0,76	24,10	7,95	4,17	36,22
15.	Kota Sawahlunto	17,45	4,86	0,82	23,13	10,44	3,36	36,93
16.	Kota Padang Panjang	16,45	3,91	1,93	22,29	15,24	4,29	41,82
17.	Kota Bukittinggi	21,64	4,82	2,67	29,13	13	2,32	44,45
18.	Kota Payakumbuh	18,65	4,6	2,39	25,64	7,18	4,92	37,74
19.	Kota Pariaman	24,65	2,12	6,07	32,84	6,98	3,98	43,46
<b>20.</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>20,84</b>	<b>4,81</b>	<b>1,59</b>	<b>27,20</b>	<b>9,22</b>	<b>4,04</b>	<b>40,40</b>

Keterangan :

- KIDRT : Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga
- KIDS : Konsumsi Ikan Udang Segar
- KIDA : Konsumsi Ikan Dalam Bentuk Olahan
- KIMJ : Konsumsi Ikan Makanan Jadi
- KLRT : Konsumsi Luar Rumah Tangga
- KTT : Konsumsi Tidak Tercatat

Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya seperti kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melakukan pembinaan dan koordinasi ke Kab/Kota sehingga Kabupaten/Kota telah termotivasi

untuk melakukan sosialisasi manfaat makan ikan ke masyarakat serta meningkatnya peran serta Forikan yang ada di setiap Kab/Kota dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas terkait di Kabupaten/Kota dalam melakukan perhitungan konsumsi ikan perkapita masyarakat di daerah. Juga merupakan faktor pendukung meningkatnya konsumsi ikan perkapita, berdasarkan perhitungan yang semakin baik dan akurat.

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah:

1. Pada Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada CV. Samara Food Payakumbuh Sumatera Barat sebagai juara 3 Penilaian Unit Pengolahan Ikan Terbaik Tahun 2021 sebagai Kategori Skala Mikro Kecil.



2. Mendapatkan penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat Atas Partisipasi Mendukung Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat di Daerahnya.



Adapun hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan yaitu:

1. Belum terpenuhinya kuota produk yang akan diekspor.
2. Belum seluruhnya masyarakat mengkonsumsi ikan sesuai dengan standar yang seharusnya.
3. Masyarakat masih banyak menyukai komoditi lain untuk dikonsumsi.

#### 2.1.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Keberhasilan capaian indikator Sasaran 3 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya 1). Dukungan alokasi dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD dan APBN Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 3 sebagai tabel berikut:

**Tabel. 3.26. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan yang Mendukung	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	<b>1. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>2,381,458,311</b>	<b>2,254,579,028</b>	<b>94.67</b>
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	582,556,000	551,126,000	94.60
2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	582,556,000	551,126,000	94.60
	2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1,410,935,311	1,321,984,781	93.70
	a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Bidang PDSKP dan UPTD PPMHP)	287,849,160	277,487,000	96.40
	b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Bidang PDSKP dan UPTD PPMHP)	1,123,086,151	1,044,497,781	93.00
	3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	387,967,000	381,468,247	98.32
	a. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	387,967,000	381,468,247	98.32
	<b>Total</b>	<b>2,381,458,311</b>	<b>2,254,579,028</b>	<b>94.67</b>

Dilihat dari tabel di atas, terlihat jelas program dan kegiatan yang telah dilakukan sangat mendukung keberhasilan kinerja sasaran 3

**Tabel.3.27 Efisiensi Sumberdaya Sasaran 3**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	149,99	94,69	55,30
	- Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	103,59	94,60	8,99

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian kinerja dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung

pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemasaran hasil perikanan yaitu indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (Milyar) dengan capaian kinerja sebesar 149,99% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,69% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 55,30%.

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) dengan capaian kinerja sebesar 103,59% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,60% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 8,99%.

**2.2 Tujuan 2 Meningkatkan Kinerja Organisasi**

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (A). Target indikator kinerja 1 (satu) yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar A

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Tujuan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian%
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,10)	A (81,21)	101,39

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 sebesar 81,21 telah mencapai 101,39% dari target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 80,10 (A).



Pencapaian tujuan tersebut juga dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada tabel 3.29

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Peningkatan Tahun 2020-2021 %
		2020	2021	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,09	81,21	0,15

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan tahunan, pada Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai sebesar 81,21 atau meningkat sebesar 0,15% dari nilai sakiip tahun 2020

<b>2.2.1</b>	<b>Sasaran 4</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</b>
--------------	------------------	--

Sasaran 4 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target A

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

**2.2.1.1. Perbandingan antara Target dengan realisasi Kinerja**

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.30 sebagai berikut :

**Tabel 3.30 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Tata Kelola Organisasi)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,10)	A (81,21)	101,39	Memuaskan

Di lihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja yaitu nilai AKIP sudah tercapai.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 diperoleh dari komponen sebagai berikut :

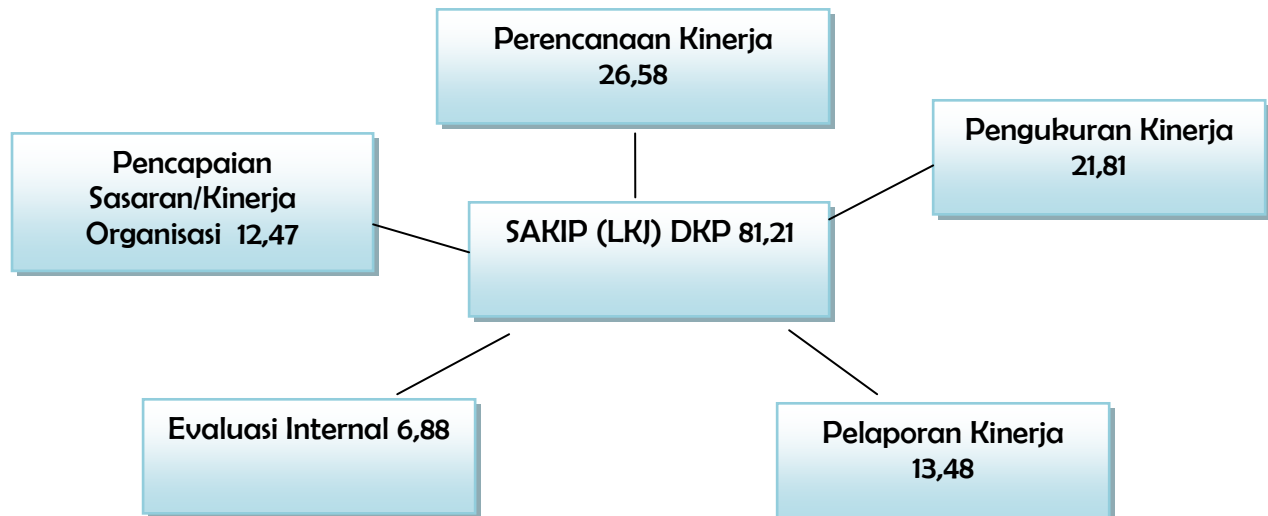
**Tabel 3.31 Capaian Komponen Pembentuk**

No.	Komponen Pembentuk	Target (%)	Tahun	
			2020	2021
1	Perencanaan kinerja	30	26,52	26,58
2	Pengukuran kinerja	25	18,78	21,81
3	Pelaporan kinerja	15	13,56	13,48
4	Evaluasi Internal	10	6,35	6,88
5	Pencapaian sasaran kinerja / kinerja organisasi	20	15,88	12,47
	Nilai hasil evaluasi	100	81,09	81,21
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 nilai A (80,10%), berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realiasi sebesar 81,21% dengan capaian sebesar 101,39% (Memuaskan) meningkat dibandingkan tahun 2020

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja masih perlu peningkatan nilai akuntabilitas kinerja khususnya terkait pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 ditargetkan A (80,10%). Penilaian AKIP ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat hal ini dapat dilihat dari uraian dibawah ini :



Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tersebut, setiap tahun dilakukan oleh Tim Inspektorat.

Hal ini juga dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

#### 2.2.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2019, target kinerja predikat BB (72,00) dan realisasinya predikat BB (73,67) sehingga capainnya 102,32%
- Tahun 2020, target kinerja predikat A (80,01) dan realisasnya predikat A (81,09) sehingga capaiannya 101,36%
- Tahun 2021, target kinerja predikat A (80,10) dan realisasnya predikat A (81,21) sehingga capaiannya 101,39%

**Tabel.3.32.**

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2019-2021**

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,00)	A (80,01)	A (80,10)	BB (73,67)	A (81,09)	A (81,21)	102,32	101,36	101,39

Di lihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2019 realisasi sebesar 73,67% dengan capaian 102,32%, tahun 2020 terealisasi sebesar 81,09% dengan capaian 101,36% dan tahun 2021 terealisasi sebesar 81,21% dengan capaian 101,39% sehingga persentase capaian melebihi 100% dengan memuaskan.

### 2.2.1.3. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran 4 yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 adalah dengan nilai A (81,21%) dengan capaian kinerja 103,39%, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran startegis 4 pada indikator tersebut.

**2.2.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Keberhasilan capaian indikator Sasaran 4 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya 1). Dukungan alokasi dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2021. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 59.626.862.177,-. Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 4 sebagai tabel berikut:

**Tabel. 3.32. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 4**

Kode Rekening						Nama Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	2	3
						<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>59,626,862,177</b>
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21,280,980,582</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>265,265,418</b>
3	25	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,403,811
3	25	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87,255,857
3	25	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,605,750
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>15,691,739,318</b>
3	25	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,783,584,318
3	25	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	807,655,000
3	25	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,500,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>126,500,000</b>
3	25	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114,000,000
3	25	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,500,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>760,828,000</b>
3	25	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,500,000
3	25	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135,950,000
3	25	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,000,000
3	25	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,360,000

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536,018,000
3	25	01	1	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125,080,000
3	25	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	16,200,000
3	25	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,880,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,922,717,846</b>
3	25	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000
3	25	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,561,661,534
3	25	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,357,056,312
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>388,850,000</b>
3	25	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339,970,000
3	25	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000
3	25	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,880,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</u></b>	<b>611,234,900</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>434,263,500</b>
3	25	02	1	01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	58,640,000
3	25	02	1	01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,370,000
3	25	02	1	01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150,253,500
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>176,971,400</b>
3	25	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	115,995,000
3	25	02	1	03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34,836,400
3	25	02	1	03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26,140,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</u></b>	<b>16,566,302,877</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>14,566,950,177</b>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	03	1	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	58,032,432
3	25	03	1	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	14,324,917,745
						Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum	184,000,000
3	25	03	1	02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1,747,016,700</b>
3	25	03	1	02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,747,016,700
3	25	03	1	03		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>252,336,000</b>
3	25	03	1	03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	97,336,000
3	25	03	1	03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	155,000,000
3	25	04				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</u></b>	<b>1,773,167,600</b>
3	25	04	1	01		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>39,350,000</b>
3	25	04	1	01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	39,350,000
3	25	04	1	05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1,733,817,600</b>
3	25	04	1	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1,393,576,600
3	25	04	1	05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kotadan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya	16,908,800
						Pengembangan Budidaya Udang Vaname	16,908,800
3	25	04	1	05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151,451,400
3	25	04	1	05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171,880,800
						Pelatihan dan Pembinaan CBIB	171,880,800
3	25	05				<b><u>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</u></b>	<b>2,055,181,325</b>
3	25	05	1	01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>1,948,212,825</b>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	05	1	01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	99,943,050
3	25	05	1	01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1,628,313,775
3	25	05	1	01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	219,956,000
3	25	05	1	02		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>106,968,500</b>
3	25	05	1	02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	106,968,500
3	25	06				<b><u>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</u></b>	<b>1,819,597,191</b>
3	25	06	1	01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>582,556,000</b>
3	25	06	1	01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	582,556,000
3	25	06	1	02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>849,074,191</b>
3	25	06	1	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	95,487,000
3	25	06	1	02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	753,587,191
3	25	06	1	03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>387,967,000</b>
3	25	06	1	03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	387,967,000
						<b>UPTD BPBALP</b>	<b>1,438,557,760</b>
3	25	04				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</u></b>	<b>1,438,557,760</b>
3	25	04	1	05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1,438,557,760</b>
3	25	04	1	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	631,178,800
3	25	04	1	05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	777,300,560

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

						Ikan di Laut	
3	25	04	1	05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30,078,400
						<b>UPTD KPSDKP</b>	<b>4,695,921,517</b>
3	25	02				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</u></b>	<b>4,203,896,257</b>
3	25	02	1	01		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>4,203,896,257</b>
3	25	02	1	01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4,203,896,257
3	25	04				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</u></b>	<b>492,025,260</b>
3	25	04	1	05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>492,025,260</b>
3	25	04	1	05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	492,025,260
						<b>UPTD PPMHP</b>	
3	25	06				<b><u>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</u></b>	<b>561,862,120</b>
3	25	06	1	02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>192,363,160</b>
3	25	06	1	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	192,363,160
3	25	06	1	02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	369,498,960
						<b>UPTD PPW I</b>	
3	25	03				<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</u></b>	<b>4,323,501,400</b>
3	25	03	1	01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>3,518,933,400</b>
3	25	03	1	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3,518,933,400
3	25	03	1	06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>804,568,000</b>
3	25	03	1	06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	804,568,000

							<b>UPTD PPW II</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>					<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</u></b>	<b>3,762,111,380</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>2,753,455,880</b>
3	25	03	1	02	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2,753,455,880
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>06</b>			<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>1,008,655,500</b>
3	25	03	1	06	03		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1,008,655,500
							<b>UPTD PPW III</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>					<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</u></b>	<b>738,443,525</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>182,080,025</b>
3	25	03	1	01	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	182,080,025
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>06</b>			<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>556,363,500</b>
3	25	03	1	06	03		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	556,363,500

Dilihat dari tabel di atas, terlihat jelas program dan kegiatan yang telah dilakukan sangat mendukung keberhasilan kinerja sasaran 4

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

##### **1. Realisasi Anggaran APBD**

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 59.626.862.777,- dengan rincian sebagaimana tabel 3.33 berikut:

Tabel. 3.33. Analisis Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% Fisik	Sisa
1.	Belanja Langsung	59.626.862.777	55.118.431.881,91	92,44	99,23	4.508.430.895,09
	<b>Total belanja langsung</b>	<b>59.626.862.777</b>	<b>55.118.431.881,91</b>	<b>92,44</b>	<b>99,23</b>	<b>4.508.430.895,09</b>

Adapun pagu dan realisasi keuangan termasuk anggaran perubahan sebesar Rp.59.626.862.777,- terealisasi sebesar Rp. 55.118.431.881,91,- (92,44) fisik 99,23% tidak terlaksananya fisik 100% karena adanya 2 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu 1). Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (DAK) yaitu dermaga PPI Carocok tidak terlaksana karena tidak cukup waktu untuk dilakukan tender ulang dan kegiatan penunjang DAK berupa jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan fisik tidak cukup waktu untuk dilakukan tender ulang dan adanya sisa kontrak dari kegiatan DAK, 2), Kegiatan Restocking Ikan di Perairan Umum karena ketersediaan benih di alam tidak mencukupi dan faktor cuaca, dan juga ada sisa dari belanja kegiatan lainnya seperti sisa kontrak dan sisa perjalanan dinas. Pagu dan realisasi keuangan tahun 2021 dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

Tabel. 3.34. Analisis Akuntabilitas Rincian Keuangan / Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD SAMPAI BULAN DESEMBER 2021												
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT												
Kode Rekening			Nama Kegiatan					Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		SISA
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							<b>59,626,862,177</b>	<b>99.23</b>	<b>55,118,431,881.91</b>	<b>92.44</b>	<b>4,508,430,295</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21,280,980,582</b>	<b>100.00</b>	<b>20,810,314,369</b>	<b>97.79</b>	<b>470,666,213</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>265,265,418</b>	<b>100.00</b>	<b>261,983,433</b>	<b>98.76</b>	<b>3,281,985</b>	
3	25	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,403,811	100.00	67,337,300	97.02	2,066,511	
3	25	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87,255,857	100.00	87,093,033	99.81	162,824	
3	25	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,605,750	100.00	107,553,100	99.03	1,052,650	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>15,691,739,318</b>	<b>100.00</b>	<b>15,264,931,580</b>	<b>97.28</b>	<b>426,807,738</b>	
3	25	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,783,584,318	100.00	14,367,349,830	97.18	416,234,488	
3	25	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	807,655,000	100.00	797,499,850	98.74	10,155,150	
3	25	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,500,000	100.00	100,081,900	99.58	418,100	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>126,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>126,028,800</b>	<b>99.63</b>	<b>471,200</b>	
3	25	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114,000,000	100.00	113,528,800	99.59	471,200	
3	25	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,500,000	100.00	12,500,000	100.00	-	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>760,828,000</b>	<b>100.00</b>	<b>756,108,118</b>	<b>99.38</b>	<b>4,719,882</b>	
3	25	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,500,000	100.00	12,263,800	98.11	236,200	
3	25	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135,950,000	100.00	135,272,050	99.50	677,950	
3	25	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,000,000	100.00	54,999,850	100.00	150	
3	25	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,360,000	100.00	17,820,000	83.43	3,540,000	
3	25	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536,018,000	100.00	535,752,418	99.95	265,582	
3	25	01	1	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125,080,000	100.00	122,798,000	98.18	2,282,000	
3	25	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	16,200,000	100.00	15,675,000	96.76	525,000	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,880,000	100.00	107,123,000	98.39	1,757,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,922,717,846</b>	<b>100.00</b>	<b>3,911,289,192</b>	<b>99.71</b>	<b>11,428,654</b>
3	25	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	100.00	3,797,500	94.94	202,500
3	25	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,561,661,534	100.00	1,555,716,849	99.62	5,944,685
3	25	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,357,056,312	100.00	2,351,774,843	99.78	5,281,469
						<i>Penyediaan Jasa Kebersihan , Pengamanan, dan sopir Kantor</i>	<i>2,357,056,312</i>	<i>100.00</i>	<i>2,351,774,843</i>	<i>99.78</i>	<i>5,281,469</i>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>388,850,000</b>	<b>100.00</b>	<b>367,175,246</b>	<b>94.43</b>	<b>21,674,754</b>
3	25	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339,970,000	100.00	318,826,446	93.78	21,143,554
						Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	339,970,000	100.00	318,826,446	93.78	21,143,554
3	25	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	100.00	19,861,800	99.31	138,200
						Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	20,000,000	100.00	19,861,800	99.31	138,200
3	25	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,880,000	100.00	28,487,000	98.64	393,000
						Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	28,880,000	100.00	28,487,000	98.64	393,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>611,234,900</b>	<b>100.00</b>	<b>562,321,014</b>	<b>92.00</b>	<b>48,913,886</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>434,263,500</b>	<b>100.00</b>	<b>402,398,693</b>	<b>92.66</b>	<b>31,864,807</b>
3	25	02	1	01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	58,640,000	100.00	36,329,850	61.95	22,310,150
						<i>Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau kecil + Sosialisasi Pulau Kecil</i>	<i>58,640,000</i>	<i>100.00</i>	<i>36,329,850</i>	<i>61.95</i>	<i>22,310,150</i>
3	25	02	1	01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,370,000	100.00	220,179,151	97.70	5,190,849
3	25	02	1	01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150,253,500	100.00	145,889,692	97.10	4,363,808
						<i>Penanaman Pohon Pelindung Pantai</i>	<i>150,253,500</i>	<i>100.00</i>	<i>145,889,692</i>	<i>97.10</i>	<i>4,363,808</i>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>176,971,400</b>	<b>100.00</b>	<b>159,922,321</b>	<b>90.37</b>	<b>17,049,079</b>
3	25	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	115,995,000	100.00	103,665,350	89.37	12,329,650
						<i>Sekolah Pantai Indonesia dan Pemilihan Putra Putri Maritim</i>	<i>59,795,000</i>	<i>100.00</i>	<i>55,987,550</i>	<i>93.63</i>	<i>3,807,450</i>
						<i>Forum Koordinasi dan Pembinaan kelompok Perempuan Pesisir dalam Rangka Kesetaraan Gender</i>	<i>56,200,000</i>	<i>100.00</i>	<i>47,677,800</i>	<i>84.84</i>	<i>8,522,200</i>
3	25	02	1	03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34,836,400	100.00	34,070,971	97.80	765,429
3	25	02	1	03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26,140,000	100.00	22,186,000	84.87	3,954,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>16,566,302,877</b>	<b>100.00</b>	<b>15,527,715,210</b>	<b>93.73</b>	<b>1,038,587,667</b>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	03	1	01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>14,566,950,177</b>	<b>100.00</b>	<b>13,912,043,610</b>	<b>95.50</b>	<b>654,906,567</b>
3	25	03	1	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	58,032,432	100.00	50,683,200	87.34	7,349,232
3	25	03	1	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	14,324,917,745	100.00	13,687,442,028	95.55	637,475,717
						<i>Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum</i>	184,000,000	100.00	173,918,382	94.52	10,081,618
3	25	03	1	02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1,747,016,700</b>	<b>100.00</b>	<b>1,395,613,000</b>	<b>79.89</b>	<b>351,403,700</b>
3	25	03	1	02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,747,016,700	100.00	1,395,613,000	79.89	351,403,700
						<i>Restocking Ikan di Perairan Umum</i>	1,747,016,700	100.00	1,395,613,000	79.89	351,403,700
3	25	03	1	03		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>252,336,000</b>	<b>100.00</b>	<b>220,058,600</b>	<b>87.21</b>	<b>32,277,400</b>
3	25	03	1	03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	97,336,000	100.00	76,158,600	78.24	21,177,400
3	25	03	1	03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	155,000,000	100.00	143,900,000	92.84	11,100,000
						<i>Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan</i>	155,000,000	100.00	143,900,000	92.84	11,100,000
3	25	04				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1,773,167,600</b>	<b>100.00</b>	<b>1,614,125,450</b>	<b>91.03</b>	<b>159,042,150</b>
3	25	04	1	01		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>39,350,000</b>	<b>100.00</b>	<b>38,274,922</b>	<b>97.27</b>	<b>1,075,078</b>
3	25	04	1	01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	39,350,000	100.00	38,274,922	97.27	1,075,078
3	25	04	1	05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1,733,817,600</b>	<b>100.00</b>	<b>1,575,850,528</b>	<b>90.89</b>	<b>157,967,072</b>
3	25	04	1	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1,393,576,600	100.00	1,258,015,600	90.27	135,561,000
3	25	04	1	05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kotadan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya	16,908,800	100.00	15,518,800	91.78	1,390,000
						<i>Pengembangan Budidaya Udang Vaname</i>	16,908,800	100.00	15,518,800	91.78	1,390,000
3	25	04	1	05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151,451,400	100.00	143,855,400	94.98	7,596,000



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

3	25	04	1	05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171,880,800	100.00	158,460,728	92.19	13,420,072
						Pelatihan dan Pembinaan CBIB	171,880,800	100.00	158,460,728	92.19	13,420,072
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>				<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>2,055,181,325</b>	<b>100.00</b>	<b>2,019,002,234</b>	<b>98.24</b>	36,179,091
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>1,948,212,825</b>	<b>100.00</b>	<b>1,913,625,114</b>	<b>98.22</b>	34,587,711
3	25	05	1	01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	99,943,050	100.00	95,456,021	95.51	4,487,029
3	25	05	1	01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1,628,313,775	100.00	1,602,733,725	98.43	25,580,050
3	25	05	1	01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	219,956,000	100.00	215,435,368	97.94	4,520,632
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>106,968,500</b>	<b>100.00</b>	<b>105,377,120</b>	<b>98.51</b>	<b>1,591,380</b>
3	25	05	1	02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	106,968,500	100.00	105,377,120	98.51	1,591,380
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1,819,597,191</b>	<b>100.00</b>	<b>1,714,123,709</b>	<b>94.20</b>	<b>105,473,482</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>582,556,000</b>	<b>100.00</b>	<b>551,126,000</b>	<b>94.60</b>	<b>31,430,000</b>
3	25	06	1	01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	582,556,000	100.00	551,126,000	94.60	31,430,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>849,074,191</b>	<b>100.00</b>	<b>781,529,462</b>	<b>92.04</b>	<b>67,544,729</b>
3	25	06	1	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	95,487,000	100.00	88,919,500	93.12	6,567,500
						<i>Diversifikasi Pengelolaan Hasil Kelautan dan Perikanan</i>	<i>95,487,000</i>	<i>100.00</i>	<i>88,919,500</i>	<i>93.12</i>	<i>6,567,500</i>
3	25	06	1	02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	753,587,191	100.00	692,609,962	91.91	60,977,229
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>387,967,000</b>	<b>100.00</b>	<b>381,468,247</b>	<b>98.32</b>	<b>6,498,753</b>
3	25	06	1	03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	387,967,000	100.00	381,468,247	98.32	6,498,753

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

						<i>Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan</i>	387,967,000	100.00	381,468,247	98.32	6,498,753
						<b>UPTD BPBALP</b>	<b>1,438,557,760</b>	<b>100.00</b>	<b>1,401,274,161.30</b>	97.41	37,283,599
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1,438,557,760</b>	<b>100.00</b>	<b>1,401,274,161.30</b>	<b>97.41</b>	<b>37,283,599</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1,438,557,760</b>	<b>100.00</b>	<b>1,401,274,161</b>	<b>97.41</b>	<b>37,283,599</b>
3	25	04	1	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	631,178,800	100.00	620,873,261.30	98.37	10,305,539
3	25	04	1	05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	777,300,560	100.00	751,275,200	96.65	26,025,360
3	25	04	1	05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30,078,400	100.00	29,125,700	96.83	952,700
						<b>UPTD KPSDKP</b>	<b>4,695,921,517</b>	<b>100.00</b>	<b>4,382,331,262.75</b>	<b>93.32</b>	<b>313,590,254</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>4,203,896,257</b>	<b>100.00</b>	<b>3,891,393,565.35</b>	<b>92.57</b>	<b>312,502,692</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>4,203,896,257</b>	<b>100.00</b>	<b>3,891,393,565.35</b>	<b>92.57</b>	<b>312,502,692</b>
3	25	02	1	01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4,203,896,257	100.00	3,891,393,565.35	92.57	312,502,692
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>492,025,260</b>	<b>100.00</b>	<b>490,937,697.40</b>	<b>99.78</b>	<b>1,087,563</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>492,025,260</b>	<b>100.00</b>	<b>490,937,697.40</b>	<b>99.78</b>	<b>1,087,563</b>
3	25	04	1	05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	492,025,260	100.00	490,937,697.40	99.78	1,087,563
						<b>UPTD PPMHP</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>561,862,120</b>	<b>100.00</b>	<b>540,455,319</b>	<b>96.19</b>	<b>21,406,801</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>192,363,160</b>	<b>100.00</b>	<b>188,567,500</b>	<b>98.03</b>	<b>3,795,660</b>
3	25	06	1	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	192,363,160	100.00	188,567,500	98.03	3,795,660
3	25	06	1	02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	369,498,960	100.00	351,887,819	95.23	17,611,141

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

						UPTD PPW I					
3	25	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>4,323,501,400</b>	<b>89.42</b>	<b>2,483,483,368</b>	<b>57.44</b>	<b>1,840,018,032</b>
3	25	03	1	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3,518,933,400	87.00	1,689,474,768	48.01	1,829,458,632
3	25	03	1	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3,518,933,400	87.00	1,689,474,768	48.01	1,829,458,632
3	25	03	1	06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>804,568,000</b>	<b>100.00</b>	<b>794,008,600</b>	<b>98.69</b>	<b>10,559,400</b>
3	25	03	1	06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	804,568,000	100.00	794,008,600	98.69	10,559,400
						<b>UPTD PPW II</b>					
3	25	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3,762,111,380</b>	<b>100.00</b>	<b>3,327,397,281</b>	<b>88.44</b>	<b>434,714,099</b>
3	25	03	1	02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2,753,455,880	100.00	2,318,856,234	84.22	434,599,646
3	25	03	1	02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2,753,455,880	100.00	2,318,856,234	84.22	434,599,646
3	25	03	1	06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>1,008,655,500</b>	<b>100.00</b>	<b>1,008,541,047</b>	<b>99.99</b>	<b>114,453</b>
3	25	03	1	06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1,008,655,500	100.00	1,008,541,047	99.99	114,453
						<b>UPTD PPW III</b>					
3	25	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>738,443,525</b>	<b>100.00</b>	<b>735,888,504</b>	<b>99.65</b>	<b>2,555,021</b>
3	25	03	1	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	182,080,025	100.00	180,725,004	99.26	1,355,021
3	25	03	1	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	182,080,025	100.00	180,725,004	99.26	1,355,021
3	25	03	1	06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>556,363,500</b>	<b>100.00</b>	<b>555,163,500</b>	<b>99.78</b>	<b>1,200,000</b>
3	25	03	1	06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	556,363,500	100.00	555,163,500	99.78	1,200,000

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

2. Realisasi Anggaran APBN

Pada kegiatan yang di danai dari APBN Murni dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.954.364.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.911.470.231,- atau sebesar 97,81% dengan realisasi fisik 100%. dengan rincian sebagaimana tabel 3.32.

**TABEL. 3.35. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN ALIRAN KAS SAMPAI DENGAN BULAN SAMPAI DESEMBER 2021**

NO	Kode MAK	Program/Kegiatan/Output	PAGU ANGGARAN/DANA (Rp.)		REALISASI RUPIAH MURNI		SISA DANA Rp	KET.	
			Dekonsentrasi Rp	Jumlah Rp	Fisik (%)	Keuangan			
						Rp			(%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1		Sekretaris Jenderal 080007(Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (01) 080007	426,882,000	426,882,000	100.00	414,573,300	97.12	12,308,700	
2.		Ditjen Perikanan Tangkap (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap) (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (03) 089000	298,688,000	298,688,000	100.00	292.623.000	97.97	6.065,000	
3.		Ditjen Perikanan Budidaya (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (04) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (Dana Dekonsentrasi 089003)	692,617,000	692,617,000	100.00	677.531.731	97.82	15.085.269	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021**

4	Ditjen PSDKP (Program Pengawasan Pengelolaan sumber Daya Kelautan dan Perikanan) 089004 (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (05))	160,202,000	160,202,000	100.00	155.012.000	96.76	5.190.000	
5.	Ditjen PDSKP (Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) 089005 (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (06))	117,455,000	117,455,000	100.00	117,325,300	99.89	129,700	
6.	Ditjen PRL(Program Pengelolaan Ruang Laut) 089006 (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (07))	258,520,000	258,520,000	100.00	254.404.900	98.41	4.115.100	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1,954,364,000</b>	<b>1,954,364,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,911.470.231</b>	<b>97.81</b>	<b>42.893.769</b>	

3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut ini :

**Tabel 3.36. Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021**

No.	Nama UPTD	Target	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah</b>			
	1. Laboratorium di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	10.000.000	25.002.028	250
	(Labor-Bungus)		17.340.000	
	(Sewa Mes Sicincin)		4.200.000	
	(Sewa Rumah Dinas)		3.062.028	
	(Sewa Aula Sicincin)		400.000	
	<b>Jumlah I</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25.002.028</b>	<b>250</b>
<b>II.</b>	<b>Pelayanan Jasa ke Pelabuhan</b>			
	1. Pelabuhan Perikanan Wilayah I	300.000.000	306.656.000	102
	- Carocok	40.000.000	98.597.000	
	- Kambang	260.000.000	208.059.000	
	2. Pelabuhan Perikanan Wilayah II	400.000.000	461.509.000	115
	- Tiku		334.259.000	
	- Air Bangis		120.250.000	
	- PPI Sasak		7.000.000	
	3. Pelabuhan Perikanan Wilayah III	280.000.000	339.839.000	121
	<b>Jumlah II</b>	<b>980.000.000</b>	<b>1.108.004.800</b>	<b>113</b>
<b>III.</b>	<b>Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>			
	(Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)	30.000.000	42.698.000	142
	<b>Jumlah III</b>	<b>30.000.000</b>	<b>42.698.000</b>	<b>142</b>
<b>IV.</b>	<b>Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>			
	1. UPTD Balai Budidaya Air laut dan Payau	372.750.000	398.299.615	
	<b>Jumlah IV</b>	<b>372.750.000</b>	<b>398.229.615</b>	<b>107</b>
<b>V.</b>	<b>Penerimaan Lain-lain</b>			
	Denda		119.633.710	
	Setoran Pemby klaim Bank Garansi		47.598.150	
	Penerimaan Lain-Lain dari KKPD/Sicincin		35.400.000	
	Setoran Pemby Jaminan Pelaksanaan CV.Letter.W		45.966.800	
	Sewa lahan Tanah/Gudang es mini PPI Sasak		2.000.000	
	Sewa los PPI Air Bangis		6.000.000	
	<b>Jumlah IV</b>		<b>256.598.660</b>	
	<b>Jumlah Semua</b>	<b>1.392.750.000</b>	<b>1.830.603.103</b>	<b>131</b>

Dilihat dari tabel 3.33 di atas, capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 131% dimana target Tahun 2021 sebesar Rp. 1.392.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.830.603.103,- (131%). Capaian ini diperoleh dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa ke pelabuhan, tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi usaha daerah dan penerimaan lain-lain.



## BAB.IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pelaksanaan capaian target sasaran strategis tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp.59.626.862.777,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.55.118.431.881,91,- (92,44%) dan realisasi fisik sebesar 99,23%. Serta alokasi dana APBN tahun 2021 sebesar Rp.1.954.364.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.911.470.231,- sebesar 97,81% dengan realisasi fisik 100%.

Rata-rata capaian dari 6 (enam) indikator kinerja utama sebesar 110,60%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan dengan jumlah pendapatan nelayan dari target 38.400.000 Rp/org/th terealisasi 40.452.255 Rp/org/th dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,34.% dengan nilai memuaskan. Sedangkan untuk Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target 49.800.000 Rp/org/th terealisasi sebesar 49.922.320 Rp/org/th dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,25% memperoleh nilai sangat baik.
2. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dengan target 80% terealisasi sebesar 84,34% dengan tingkat capaian 105,43% memperoleh nilai memuaskan.

3. Dari indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dengan target 153,76 milyar terealisasi 230,62 milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar 149,99% dengan nilai memuaskan. Negara tujuan ekspor 2021 yaitu USA, Bangkok, Guangzhoo, Hongkong, Singapura, Miami, Los Angeles, Tokyo, Manila, Taipie, Canada, India, Malaysia, Thailand, Jepang, China, Amerika.
4. Untuk tingkat konsumsi ikan di Sumatera Barat dengan target 39 kg/kap/th terealisasi sebesar 40,40 kg/kap/th dengan tingkat capaian sebesar 103,39 % dengan nilai memuaskan. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga melakukan upaya seperti kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan forikan serta didukung oleh kegiatan lain.
5. Untuk indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target A (80.10) teralisasi sebesar A (81,21) dengan nilai memuaskan.

Secara umum sasaran-sasaran yang telah disusun dan rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan persentasi capaian 5 indikator yang memuaskan dan 1 indikator dengan kategori sangat baik, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, baik melalui dukungan APBD maupun APBN.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan –permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi perikanan budidaya
- c. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
- d. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan payau
- e. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan

- f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
- g. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
- h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum
- i. Pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut maka solusi dan upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
2. Mengembangkan usaha – usaha ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
  - b. Pengembangan budidaya laut, payau dan komoditas perikanan lainnya.
3. Pengembangan *system value chain*, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
  - b. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan
  - c. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup
4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Dari kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2021 dari pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN adalah :

1. Produksi Perikanan

Produksi (ton)	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
Perikanan Tangkap	219.158,08	219.570,3	0,19
Budidaya	247.798,60	261.573,39	5,56

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

2. Tingkat Pendapatan Petani/Nelayan/tahun :

Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
Nelayan	39.650.250	40.452.555	2,02
Pembudidaya Ikan	43.504.570	49.922.320	14,75

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

3. Produksi Benih (ekor)

Produksi	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
Pembenihan			
Produksi Pembenihan	3.065.667.000	4.000.111.000	30,48

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

4. Konsumsi Ikan kg/kapita/th

Konsumsi	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
Konsumsi Ikan perkap/th	39,27	40,40	2,88

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

5. Ekspor Komoditas Perikanan (Milyar)

Ekspor	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
Ekspor Komoditas Perikanan	165,12	230,62	39,67

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

6. Tercapainya PAD Provinsi Sumatera Barat

PAD	Tahun 2020	Tahun 2021	% Kenaikan
PAD	1.484.285.599	1.830.403.103	23,32

7. BBI dan UPR yang berserifikat CPIB

Sertifikat	Tahun 2020	Tahun 2021*	% Kenaikan
BBI	43	43	-
UPR	103	115	11,65

- Angka Tahun 2021 merupakan angka sementara

Selama Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mampu meraih beberapa keberhasilan dan prestasi yang cukup membanggakan sebagai bentuk dari kerja keras dan upaya yang dilakukan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, diantaranya:

1. Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diberikan kepada CV. Samara Food Payakumbuh Sumatera Barat Juara 3 Penilaian Unit Pengolahan Ikan Terbaik Tahun 2021 Kategori Skala Mikro Kecil
2. Penghargaan dari menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat Atas Partisipasi Mendukung Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat di Daerahnya

Dari hasil yang dicapai, masih banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa peningkatan sarana dan prasarana produksi bagi Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan, Peningkatan SDM Aparatur maupun Masyarakat Perikanan, Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Lain-lain.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah di capai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN KOTOTINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25 128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)  
(0751) 27089 (Sekretariat)  
(0751) 33288 (umum)  
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.Ir.DESNIARTI,MM**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**


Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2021

PIHAK KEDUA  
  
MAHYELDI

PIHAK PERTAMA  
  
Dr.Ir.DESNIARTI,MM  
NIP. 19650824 199003 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

TAHUN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/Th) 2. Jumlah Pendapatan pembudidaya ikan ( Rp/org/Th)	38.400.000,- 49.800.000,-
2.	Terwujudnya pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	1. Persentase Kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing (%)	80 %
3.	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) 2. Tingkat Konsumsi Ikan ( Kg/kap/th)	153,76 39
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,10)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.280.980.582,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.815.131.757,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.390.359.182,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.703.750.620,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.055.181.325,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	2.381.459.311,-	APBD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
7.	Sekretariat Jenderal (01)	426.882.000,-	APBN - DK
8.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	298.688.000,-	APBN - DK
9.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	412.117.000,-	APBN - DK
10.	Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)	160.202.000,-	APBN - DK
11.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)	117.455.000,-	APBN - DK
12.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07)	258.520.000,-	APBN - DK

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Desniarti, M.Si  
NIP. 19650824 199003 2 001

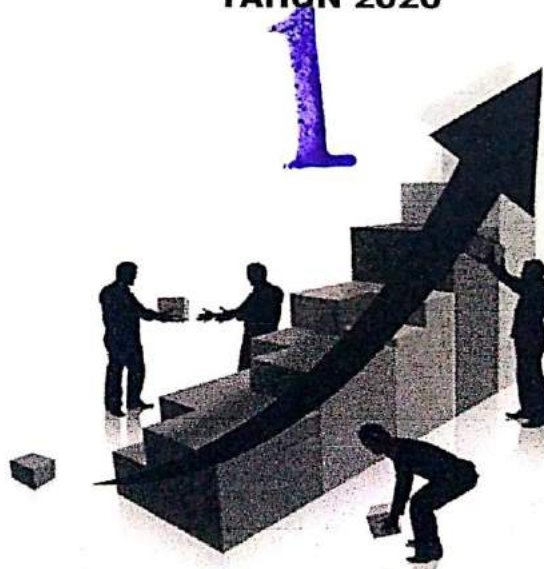


**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
HASIL EVALUASI**

**SAKIP**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**NOMOR : 04.03/INSP-LAKIP/III-2021  
TANGGAL : 30 MARET 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
I : PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM EVALUASI	1
B. JANGKA WAKTU EVALUASI	1
C. TAHUN YANG DIEVALUASI	1
D. SUSUNAN TIM EVALUASI	2
E. METODOLOGI EVALUASI	2
F. TUJUAN EVALUASI	2
G. ASPEK YANG DINILAI DALAM EVALUASI	2
H. KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	3
I. KETERBATASAN DALAM EVALUASI	3
II : HASIL EVALUASI	
A. PERENCANAAN KINERJA	3
B. PENGUKURAN KINERJA	4
C. PELAPORAN KINERJA	4
D. EVALUASI INTERNAL	4
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	5
III : REKOMENDASI	
A. PERENCANAAN KINERJA	5
B. PENGUKURAN KINERJA	5
C. PELAPORAN KINERJA	6
D. EVALUASI INTERNAL	6
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	6

1





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
Email : inspektorat@sumbar.go.id

**HASIL EVALUASI ATAS**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PADA** : **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SATUAN/UNIT KERJA** : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**TAHUN EVALUASI** : **2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM EVALUASI**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-35-2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0064/Insp-SAU/2021 tanggal 2 Februari 2021.

**B. JANGKA WAKTU EVALUASI**

Dari tanggal 3 s.d 19 Februari 2021 (12 hari)

**C. TAHUN YANG DIEVALUASI**

Tahun 2020

**D. SUSUNAN TIM EVALUASI**

- |                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Benni Warlis          | : | Penanggungjawab        |
| 2. Erni Syofyetty        | : | Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Mirza Dewi Astuti     | : | Pengendali Teknis      |
| 4. Sri Pusparani Oktavia | : | Ketua Tim              |
| 5. Chintia Lestari       | : | Anggota Tim            |

**E. METODOLOGI EVALUASI**

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan Reviu dan Wawancara tertulis terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang dievaluasi melalui pencrapan dokumen - dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Matriks 5 (lima) Tahunan, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen lainnya sebagai bukti fisik.

**F. TUJUAN EVALUASI**

1. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**G. ASPEK YANG DINILAI DALAM EVALUASI**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)</p>                    | <p>a. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (10%) meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%)</p> <p>b. Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) (20%) meliputi Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)</p> |
| <p>b. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%)</p>                     | <p>a. Evaluasi terhadap Pemenuhan Pengukuran (5%)</p> <p>b. Evaluasi terhadap Kualitas Pengukuran (12,5%)</p> <p>c. Evaluasi terhadap Implementasi Pengukuran (7,5%)</p>  |
| <p>c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)</p>                      | <p>a. Evaluasi terhadap Pemenuhan Pelaporan (3%)</p> <p>b. Evaluasi terhadap Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)</p> <p>c. Evaluasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)</p>  |
| <p>d. Evaluasi Internal (Bobot 10%)</p>                      | <p>a. Evaluasi terhadap Pemenuhan Evaluasi (2%)</p> <p>b. Evaluasi terhadap Kualitas Evaluasi (5%)</p> <p>c. Evaluasi terhadap Pemanfaatan Evaluasi (3%)</p>  |
| <p>e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja organisasi (Bobot 20%)</p> | <p>a. Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (Output) (5%)</p> <p>b. Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (10%)</p> <p>c. Kinerja lainnya (5%)</p>  |



**H. KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk, manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**I. KETERBATASAN DALAM EVALUASI**

Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan.

**II. HASIL EVALUASI**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **81,21%**, kategori **A** dengan pengertian AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel

**A. PERENCANAAN KINERJA**

Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **26,58%** dengan penjelasan :

1. Renstra sudah disusun yang memuat visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target jangka menengah. Indikator tujuan pada Renstra identik dengan indikator sasaran, dimana seharusnya indikator tujuan merupakan dampak atau manfaat dari sasaran. Target indikator tujuan belum ditetapkan, masih melekat dengan target sasaran.
2. Telah dirumuskan indikator sasaran yang berorientasi *outcome* dengan penetapan target yang cukup baik sesuai dengan kemampuan DKP untuk mencapainya.

3. Program/kegiatan yang direncanakan cukup untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dibuat mulai dari tingkat Eselon II sampai dengan staf. Penyusunan PK telah sesuai dengan *cascading*.
5. Telah terdapat Rencana Aksi untuk mencapai sasaran strategis dan telah dipantau capaiannya secara periodik, namun pembahasan reguler dan bertahap masih fokus pada realisasi program dan kegiatan tidak langsung dikaitkan dengan capaian indikator kinerja.

#### B. PENGUKURAN KINERJA

Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **21,81%** dengan penjelasan :

1. DKP telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari eselon II sampai dengan staf.
2. Pengukuran kinerja masih fokus pada capaian kinerja Eselon II, sementara untuk tingkat eselon III sampai dengan staf belum dilakukan pengukurannya secara berkala, sehingga tidak tergambar kaitan kinerja bawahan terhadap kinerja atasannya.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran. Belum terdapat perubahan program/kegiatan dan anggaran dari tahun ke tahun sebagai bentuk evaluasi terhadap keselarasan perencanaan dengan kegiatan pendukung dan anggaran yang harus disediakan.
4. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor sampai tahap capaian kinerja, baru berupa monitoring capaian program dan kegiatan.
5. Hasil pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan pemberian *reward and punishment*.

#### C. PELAPORAN KINERJA

Nilai hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **13,48 %** dengan penjelasan :

1. Laporan Kinerja (LKj) sudah disusun dan telah disampaikan tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Januari 2021.
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang diperjanjikan dan berorientasi *outcome*.
3. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis penetapan target.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya masih berupa data sisa anggaran, belum menyajikan tingkat efisiensi sumber daya terhadap pencapaian kinerja.

#### D. EVALUASI INTERNAL

Nilai hasil evaluasi terhadap Evaluasi Internal sebesar **6,88 %** dengan penjelasan :

1. Telah dilakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja melalui pembahasan reguler dan bertahap, namun masih fokus pada kinerja Eselon II, belum membahas kinerja setiap unsur pendukung mulai dari eselon III, IV dan staf.
2. Hasil evaluasi internal belum sampai ke tahap penambahan atau pengurangan kegiatan.
3. Evaluasi program dan akuntabilitas kinerja belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan.



4. Evaluasi rencana aksi baru sampai tahap penyampaian hambatan dan kendala, belum terdapat langkah/upaya serta arahan agar pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
5. Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode, baru sebatas penyampaian capaian target, hambatan dan kendala.

#### E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Nilai hasil evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 12,47% dengan penjelasan :

1. Secara umum target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 tercapai, namun terdapat target kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian 91,78%.
2. Terdapat capaian indikator kinerja menurun dari tahun sebelumnya yaitu jumlah pendapatan pembudidaya ikan, persentase kapal nelayan yang tidak melakukan ilegal fishing, nilai ekspor hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan.
3. Telah terdapat inovasi dalam manajemen kinerja namun belum dikaitkan dengan insentif/merit system.

### III. REKOMENDASI

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

#### A. PERENCANAAN KINERJA

1. Menetapkan indikator tujuan yang merupakan dampak/impact dari sasaran, tidak sama dengan indikator sasaran.
2. Menetapkan target indikator tujuan, minimal untuk target indikator tujuan tahun akhir Renstra.
3. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap Rencana Aksi secara periodik dan memanfaatkan dalam pengorganisasian program dan kegiatan. Hambatan dan kendala dalam monitoring/evaluasi Rencana Aksi harus dijadikan acuan dalam upaya mencapai target kinerja.

#### B. PENGUKURAN KINERJA

1. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat staf sampai dengan eselon III, dan kinerja eselon II dipantau secara periodik, tidak hanya terbatas pada realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan.
2. Agar IKU dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dan anggaran dari tahun ke tahun selaras dengan kinerja yang akan dicapai.
3. Optimalkan pengukuran kinerja menggunakan Teknologi Informasi.
4. Melakukan penerapan *reward* kepada pegawai dengan kinerja baik dan *punishment* untuk pegawai yang tidak dapat mencapai target kinerja.
5. IKU harus direviu secara berkala, sehingga dapat digunakan untuk dokumen perencanaan tahunan seperti RKT dan PK.

### C. PELAPORAN KINERJA

1. Laporan kinerja harus menjelaskan cara menetapkan target yang diperjanjikan.
2. Efisiensi penggunaan sumber daya harus disajikan dengan menggunakan data yang akurat dan handal, tidak hanya menyajikan sisa anggaran.
3. Laporan kinerja harus dimanfaatkan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan, digunakan untuk peningkatan kinerja dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja.

### D. EVALUASI INTERNAL

1. Melaksanakan evaluasi kinerja dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi internal untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Melaksanakan evaluasi rencana aksi terhadap capaian kinerja yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pendukungnya. Terkait kendala/hambatan agar ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan dokumentasi/administrasinya.
3. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh organisasi dalam bentuk pemberian rekomendasi-rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

### E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

1. Agar dalam penetapan target telah melalui perhitungan dan perkiraan yang memadai, agar seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Agar setiap rekomendasi perbaikan yang disarankan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja.
3. Meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya agar kinerja lebih baik dan tahun sebelumnya.
4. Agar capaian kinerja dikaitkan dengan pembayaran tunjangan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindak lanjut sebagaimana mestinya.

  
 Pjt. INSPEKTUR,  
 Ir. BENNI WARLIS, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19621004 198903 1 005







